

***POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES GERAKAN #EndSARS DI
NIGERIA TAHUN 2017-2020***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PINANGGIH RAHAYU TRI ASTUTI

22323252

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

***POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES GERAKAN #EndSARS DI
NIGERIA TAHUN 2017-2020***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PINANGGIH RAHAYU TRI ASTUTI

22323252

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES GERAKAN #EndSARS DI NIGERIA TAHUN 2017-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
20 Mei 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 05 Mei 2026



PINANGGIH RAHAYU TRI ASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGATAN

ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Cakupan Penelitian

1.5 Tinjauan Pustaka

1.6 Kerangka Pemikiran

1.7 Argumen Sementara

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

1.8.4 Proses Penelitian

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB II

**DINAMIKA DAN RESPON KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH UNIT SARS DI NIGERIA**

2.1 Kekerasan yang Dilakukan oleh Unit SARS di Nigeria

2.2 Gerakan #EndSARS

**2.3 Respon Pemerintah dan Warga Sipil Nigeria terhadap Gerakan
#EndSARS**

2.3.1 Respon Pemerintah terhadap Gerakan #EndSARS

2.3.2 Respon Warga Sipil Nigeria terhadap Gerakan #EndSARS

BAB III

POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES GERAKAN #EndSARS

**3.1 *Openness of Political Institutions* dalam Gerakan #EndSARS di
Nigeria**

3.2 *Elite Division* dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

3.3 *Presence of Allies* dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

3.4 *State Capacity for Repression* dalam Gerakan #EndSARS di

Nigeria

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Respon Pemerintah Nigeria dan Warga Sipil Nigeria terhadap Gerakan #EndSARS dari Tahun 2017-2020	33
Tabel 2. Perkembangan Keterbukaan Institusi Politik Nigeria Terhadap Gerakan #EndSARS dari tahun 2017-2020	39
Tabel 3. Perpecahan Elit yang Terjadi di Nigeria dalam Merespon Gerakan #EndSARS dari tahun 2017-2020	44
Tabel 4. Perkembangan dukungan Terhadap Gerakan #EndSARS dari tahun 2017-2020	50
Tabel 5. Bentuk Represi yang Dilakukan Negara terhadap Gerakan #EndSARS Tahun 2017 - 2020	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Postingan Seruan Menggunakan Tagar #EndSARS	23
Gambar 2. Gerakan #EndSARS Turun ke Jalan	32

DAFTAR SINGATAN

HAM : Hak Asasi Manusia

POS : Political Opportunity Structures

SARS : Special Anti-Robbery Squad

SWAT : Special Weapons and Tactics

ABSTRAK

Gerakan #EndSARS di Nigeria merupakan manifestasi ketegangan struktural akibat praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh unit Special Anti-Robbery Squad (SARS), yang kemudian berkembang menjadi mobilisasi kolektif masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perkembangan gerakan #EndSARS dalam periode 2017–2020 melalui kerangka *Political Opportunity Structures (POS)*, yang menekankan relasi antara agensi aktor dan konfigurasi peluang politik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis data sekunder secara interpretatif. Temuan menunjukkan bahwa keterbukaan institusi politik yang bersifat semu mendorong pergeseran strategi gerakan ke ruang non-institusional, khususnya media digital. Perpecahan elit politik membuka celah dalam struktur kekuasaan yang memperluas peluang mobilisasi, sementara kehadiran sekutu domestik dan internasional memperkuat kapasitas serta legitimasi gerakan. Di sisi lain, intensifikasi represi negara menghasilkan efek ambivalen, yakni membatasi mobilisasi sekaligus memperkuat solidaritas kolektif dan visibilitas internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika gerakan #EndSARS merupakan hasil interaksi dialektis antara struktur peluang politik dan praktik mobilisasi dalam relasi negara dan masyarakat sipil.

Kata-kata kunci: #EndSARS, Nigeria, Gerakan Sosial, Political Opportunity Structure

ABSTRACT

The #EndSARS movement in Nigeria represents a manifestation of structural tensions arising from systemic violence and human rights violations committed by the Special Anti-Robbery Squad (SARS), which subsequently evolved into collective mobilization by civil society. This study aims to analyze the dynamics of the #EndSARS movement from 2017 to 2020 through the Political Opportunity Structures (POS) framework, which emphasizes the relationship between actor agency and the configuration of political opportunities. Employing a qualitative approach with a case study method and interpretive analysis of secondary data, the findings indicate that the pseudo-openness of political institutions drove a strategic shift toward non-institutional arenas, particularly digital media. Elite fragmentation created openings within the power structure that expanded opportunities for mobilization, while the presence of domestic and international allies strengthened the movement's capacity and legitimacy. Meanwhile, the intensification of state repression produced ambivalent effects, simultaneously constraining mobilization and reinforcing collective solidarity as well as international visibility. This study concludes that the dynamics of the #EndSARS movement are shaped by a dialectical interaction between political opportunity structures and mobilization practices within state–society relations.

Keywords: #EndSARS, Nigeria, Social Movements, Political Opportunity Structure.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nigeria, yang terletak di Afrika Barat, merupakan negara dengan populasi terbesar di benua tersebut dan memiliki ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam melimpah, khususnya minyak bumi. Namun, di balik potensi ekonominya, negara ini juga menghadapi tantangan serius terkait keamanan internal dan penegakan hukum. *Special Anti-Robbery Squad* atau yang biasa disingkat SARS merupakan salah satu unit kepolisian khusus yang dibentuk pada tahun 1992 di Nigeria didorong oleh meningkatnya angka kriminalitas, yang mana pada awalnya unit ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus perampokan bersenjata dan juga aksi kejahatan berat lainnya (Omokanye 2020). Namun seiring berjalannya waktu, unit ini dituding melakukan hal-hal di luar tugas dan kewenangannya di awal. Tuduhan terhadap SARS mencakup berbagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seperti pemerasan, penyiksaan, penembakan warga sipil tanpa proses hukum, penghilangan paksa, hingga kekerasan seksual terhadap anak-anak muda (Ojedokun, Ogunleye, and Aderinto 2021, 1898). Terdapat beberapa faktor mengapa unit SARS melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, diantaranya adalah ketidakprofesionalan anggota unit SARS dalam menjalankan tugasnya, di mana 70% diantaranya kurang terlatih dan tidak kompeten. Selain itu juga kepolisian di Nigeria sangat terpengaruh oleh kondisi politik di sana. Lalu juga kurangnya panduan dari undang-undang kepolisian Nigeria dalam pelaksanaan tugas unit SARS (Abiodun et al. 2020, 57).

SARS di Nigeria menjadi simbol dari kebrutalan polisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan dalih guna pencegahan aksi kriminalitas. Dalam laporan Amnesty International, tercatat sedikitnya 82 kasus penyiksaan, penganiayaan, dan eksekusi di luar hukum oleh anggota SARS antara Januari 2017 hingga Mei 2020. Bentuk kekerasan yang dilakukan tidak terbatas pada penggunaan kekuatan fisik, tetapi juga mencakup penahanan tanpa alasan, penculikan, pemerasan, dan penyiksaan psikologis. Yang lebih mengkhawatirkan, tindakan ini tidak hanya ditujukan terhadap pelaku kriminal, tetapi juga menargetkan warga sipil biasa (BBC News Indonesia 2020).

Ketidakpuasan masyarakat sipil Nigeria terhadap aksi-aksi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota SARS akhirnya menimbulkan kemarahan publik. Rasa tidak aman yang seharusnya diatasi oleh aparat, justru menjadi ancaman baru bagi warga sipil. Kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian dan pemerintah semakin tergerus. Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan, hingga akhirnya masyarakat kehilangan sandaran dan merasa rentan menjadi korban atas aksi kejahatan yang dilakukan anggota unit SARS kapan saja dan di mana saja. Situasi ini menimbulkan kemarahan publik yang semakin lama semakin memuncak dan menjadi sebuah gerakan sosial untuk menyuarakan keresahaannya, hingga menjadikan media sosial sebagai wadah kemarahan publik. Gerakan #EndSARS akhirnya hadir akibat dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh unit SARS secara terus menerus selama bertahun-tahun (Agustina and Sudia 2025, 637).

Gerakan #EndSARS hadir sebagai respon awal akan kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh unit kepolisian ini. Tagar #EndSARS pertama kali

digunakan oleh warga sipil Nigeria pada tahun 2017. Tagar ini pertama kali dipelopori oleh seorang pengacara bernama Segun Awosanya melalui akun X-nya yang bernama @/segalink (Agustina and Sudia 2025, 638). Tagar ini digunakan sebagai bentuk protes mereka terhadap apa yang dilakukan unit kepolisian tersebut. Tagar ini juga digunakan untuk membagikan video maupun foto bukti atas kekerasan yang dilakukan oleh unit SARS, dan juga untuk menceritakan pengalaman mereka pribadi atas kekerasan yang mereka alami. Hingga puncaknya pada 4 Oktober 2020, ketika warga sipil Nigeria dikagetkan dengan video di media sosial yang viral. Video ini menunjukkan aksi penembakan anggota unit SARS terhadap seorang pemuda tidak bersenjata. Viralnya video ini memicu gelombang protes yang besar dari warga sipil Nigeria, dan protes pun ini terjadi di berbagai kota di Nigeria, seperti di Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano, Ibadan, Enugu, Kaduna, Benin City dan kota-kota lainnya. Gerakan ini menjadi sebuah simbol perlawanan warga sipil terhadap represifitas aparat dan ketidakadilan yang sistemik (Amnesty International 2021).

Aksi gerakan #EndSARS dengan sangat cepat berubah menjadi sebuah gerakan nasional yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis Hak Asasi Manusia, selebriti nasional hingga internasional, mahasiswa, bahkan hingga diaspora Nigeria yang berada di luar negeri. Solidaritas yang meluas ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan aparat bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi telah menyentuh aspek moral, sosial, dan politik yang lebih dalam (Martins 2023, 7).

Sebagai respon atas tekanan publik Nigeria dan internasional, pemerintah Nigeria akhirnya mengumumkan pembubaran unit SARS sebagai respon dari

gelombang protes ini. Tidak hanya membubarkan unit SARS pemerintah Nigeria juga menggantikan unit SARS dengan unit baru yaitu *Special Weapons and Tactics* atau yang disingkat SWAT (BBC News, 2020). Selain itu di beberapa negara bagian Nigeria dibentuk panel yudisial sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya unit SARS. Namun, karena masalah ini sudah lama terjadi banyak masyarakat sipil yang meragukan ketulusan langkah-langkah tersebut dan menganggap bahwa apa yang dilakukan ini tidak menyentuh akar permasalahan yang ada dan janji reformasi itu hanya bersifat semu (Uwazuruike 2021). Terlebih juga pemerintah Nigeria sudah berulang kali berjanji akan melakukan reformasi kepolisian namun tidak pernah ada perubahan yang signifikan (Malumfashi 2020). Seperti pada tahun 2018, dimana wakil presiden Nigeria saat itu mengatakan akan mereformasi SARS segera, namun nyatanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan unit SARS tetap berlanjut dan tidak ada petugas unit SARS yang dihukum di pengadilan Nigeria (Amnesty International Nigeria 2020).

Meskipun unit SARS sudah dinyatakan bubar, namun karena banyak masyarakat sipil yang meragukan pembubaran unit SARS, akhirnya gerakan ini tetap berlanjut dengan tuntutan yang lebih luas. Tuntutan dari gerakan #EndSARS sendiri pada awalnya adalah adanya reformasi kepolisian, terutama pembubaran unit SARS. Namun setelah SARS resmi dibubarkan gerakan ini berkembang menjadi sebuah fenomena sosial dan politik yang lebih luas. Gerakan ini menyoroti isu-isu yang lebih luas seperti korupsi, ketidakadilan sosial, hingga kurangnya akuntabilitas pemerintah Nigeria. Transformasi yang terjadi ini menandai bahwa ada ketidakpuasan yang meningkat terhadap *status quo* dan

hadirnya keinginan untuk perubahan berbagai aspek di Nigeria (Agbai and Adesanya 2023). Puncak dari gelombang protes yang berlanjut ini terjadi pada 20 Oktober 2020, di mana terjadi penembakan para pengunjung rasa damai di Lekki Toll Gate, Lagos. Di mana penembakan ini menewaskan 12 orang (Amnesty International 2021).

Dalam gerakan #EndSARS, keterbukaan media sosial sebagai *platform* mobilisasi, serta meningkatnya simpati dari publik dan kelompok elite tertentu, dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun tekanan terhadap pemerintah. Gerakan ini juga mencerminkan bagaimana persepsi aktor terhadap peluang politik bisa berbeda dengan kondisi objektif yang sebenarnya. Ketika aktor-aktor gerakan merasa bahwa peluang untuk menyuarakan perubahan terbuka, meskipun dalam konteks represif mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara kolektif untuk memperjuangkan tuntutan mereka.

Dengan demikian, penting untuk dapat melihat gerakan #EndSARS tidak hanya sebagai reaksi terhadap kekerasan aparat, tetapi juga sebagai cerminan dari kondisi politik yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan perubahan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dimensi situasi politik di Nigeria, khususnya dari tahun 2017 hingga 2020, dapat memengaruhi gerakan #EndSARS. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor struktur peluang politik yaitu *Openness of Political Institutions*, *Elite Division*, *Presence of Allies*, dan *State Capacity for Repression* terhadap gerakan #EndSARS.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Political Opportunity Structures* memengaruhi gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017 - 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana aksi kekerasan oleh unit SARS di Nigeria dan mengetahui bagaimana respon warga sipil nigeria serta pemerintah nigeria terhadap kekerasan yang dilakukan unit SARS.
2. Untuk menganalisis bagaimana struktur peluang politik memengaruhi gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017-2020.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana gerakan #EndSARS di Nigeria dapat berkembang dilihat dari peluang politik yang ada di Nigeria. Penulis mencoba mengambil perspektif bagaimana situasi politik di sebuah negara dapat memengaruhi sebuah gerakan sosial dapat berkembang. Dalam penelitian ini jangkauan waktu yang dipilih penulis adalah tahun 2017 hingga tahun 2020. Alasan dipilihnya tahun 2017 sebagai awalan penelitian ini dikarenakan gerakan ini hadir pertama kali pada tahun tersebut. Walaupun gelombang protes terkait kasus kekerasan aparat kepolisian sudah ada dari lama, namun tagar #EndSARS baru mulai muncul pada tahun 2017. Alasan jangkauan waktu penelitian diakhiri pada tahun 2020 adalah dikarenakan pada tahun tersebut akhirnya unit SARS dibubarkan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian berjudul *Police Brutality and Civil Violence Implications on Societal Peace and The Economy: A Study of End-SARS Protests in Nigeria* yang ditulis oleh Samuel Sunday Idowu dan Ekene Celestina Chukwudi pada tahun 2021 dalam jurnal *Political Science and Security Studies Journal* 2. Penelitian ini menunjukkan bagaimana dampak kekerasan *Special Anti-Robbery Squad* terhadap perdamaian masyarakat dan perekonomian Nigeria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada Lagos, Anambra, dan Abuja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan polisi memicu ketidakpuasan yang berujung pada protes besar-besaran yang kemudian menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial, memperburuk keretakan etnis, mengancam perdamaian, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan (Idowu and Chukwudi 2021).

Kedua, pada karya berjudul *The End SARS Women's Coalition: Exploring the Persistence of Women's Movements through Feminist Generations* yang ditulis oleh Sharon Adetutu Omotoso dan Ololade Faniyi pada tahun 2024 dalam jurnal *Feminist Africa*. Penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan perempuan dalam gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2020 dengan menempatkannya dalam konteks perjuangan feminis lintas generasi. Masalah yang diteliti adalah bagaimana para perempuan, melalui aksi seperti *Feminist Coalition* (FemCo), mengorganisasi perlawanan terhadap kebrutalan polisi dengan pendekatan berbasis feminisme dan solidaritas, serta bagaimana warisan aktivisme perempuan masa lalu seperti *Abeokuta Women's Union* (AWU) yang dipimpin Funmilayo

Ransome-Kuti memengaruhi gerakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun FemCo menghadapi hambatan seperti disinformasi, serangan siber, dan tuduhan korupsi yang bersifat misoginis, mereka berhasil memobilisasi sumber daya digital, finansial, dan sosial untuk mendukung gerakan, serta menegaskan keberlanjutan gerakan feminis Nigeria yang menentang penindasan berbasis gender dan kekerasan negara (Omotoso and Faniyi 2024).

Ketiga, pada penelitian berjudul *#EndSARS: The Movement Against Police Brutality in Nigeria* yang ditulis oleh Allwell Raphael Uwazuruike pada tahun 2020 dalam jurnal *Georgetown Journal of International Affairs*. Penelitian ini meneliti bagaimana gerakan protes #EndSARS yang menuntut penghapusan unit polisi SARS di Nigeria akibat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Masalah yang diteliti adalah kekerasan polisi yang melanggar hak-hak dasar warga seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pengadilan yang adil, hak privasi, serta hak untuk berkumpul, dan bagaimana hal ini memicu protes masal di Nigeria yang juga menarik perhatian global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Nigeria merespons dengan membubarkan SARS, tindakan ini tidak cukup untuk memuaskan tuntutan masyarakat. Protes berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menuntut keadilan sosial, reformasi pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, menegaskan bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui kebijakan berbasis hak asasi manusia yang tegas dan implementasi yang efektif (Uwazuruike 2020).

Berdasarkan beberapa literatur pembeding yang telah tersedia di atas sudah memberikan informasi terkait dengan dampak kekerasan SARS terhadap

perdamaian masyarakat dan perekonomian Nigeria, lalu keterlibatan perempuan dalam gerakan #EndSARS, serta terkait dengan gerakan protes #EndSARS yang menuntut penghapusan unit polisi SARS di Nigeria. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sudah cukup banyak yang membahas terkait gerakan #EndSARS di Nigeria. Namun belum ada yang secara spesifik membahas terkait bagaimana pengaruh situasi politik seperti keterbukaan institusi politik, perpecahan elite, kehadiran sekutu, baik media maupun tokoh politik, serta kapasitas dan strategi represif negara dapat berpengaruh terhadap perkembangan gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017 - 2020. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor peluang politik yang ada dan menyebabkan gerakan #EndSARS ini dapat berkembang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Political Opportunity Structures oleh Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald.

Political Opportunity Structures (POS) merupakan sebuah teori yang ditulis oleh Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald dalam buku *Comparative Perspectives on Social Movement* pada tahun 1996. Yang digunakan untuk menganalisis dimensi struktur peluang politik gerakan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dimensi lingkungan politik yang dapat mendorong atau menghambat sebuah gerakan sosial yang juga memengaruhi kemungkinan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan. Teori ini merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk memahami dinamika gerakan sosial dalam konteks politik yang lebih luas. Konsep ini menekankan bahwa peluang politik dapat menjadi

faktor penentu bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial. Dengan kata lain, POS melihat bahwa gerakan sosial tidak hanya bergantung pada dinamika internal gerakan, tetapi juga pada kondisi eksternal yang memungkinkan terjadinya mobilisasi kolektif (McAdam, McCarthy, and Zald 1996, 2).

POS diartikan sebagai kerangka yang mencakup berbagai dimensi yang menentukan sejauh mana sebuah sistem politik membuka peluang bagi kelompok untuk melakukan aksi protes, mobilisasi, dan perubahan politik. Secara umum, terdapat empat dimensi utama yang diidentifikasi yaitu:

1. *Openness of Political Institutions*, dimana pergerakan sebuah gerakan akan lebih mungkin terbentuk ketika lembaga politik dapat diakses oleh kelompok penekan. Semakin terbuka sistemnya, maka semakin besar peluang gerakan untuk dapat menyuarakan tuntutan mereka melalui jalur legal dan institusional (McAdam, McCarthy, and Zald 1996, 10).
2. *Elite Division*, perpecahan antara elit dapat menciptakan peluang bagi sebuah gerakan untuk mengeksplorasi lebih luas. Sistem yang tidak stabil biasanya dapat memberi ruang lebih untuk memengaruhi perubahan serta kekuatan politik yang sedang dalam keadaan berubah-ubah (McAdam, McCarthy, and Zald 1996, 10).
3. *Presence of Allies*, adalah kehadiran kelompok-kelompok sekutu seperti media, LSM dan juga kelompok elit yang bersimpati dapat memperkuat tuntutan sebuah gerakan (McAdam, McCarthy, and Zald 1996, 10).
4. *State Capacity for Repression*, represi juga memengaruhi mobilisasi gerakan di mana represi yang tinggi dapat menghambat sedangkan

ketiadaan represi justru dapat menurunkan resiko (McAdam, McCarthy, and Zald 1996, 10).

Meskipun POS mencerminkan kondisi objektif dalam sistem politik tetapi bagaimana aktor melihat, menafsirkan, dan menanggapi kondisi tersebut sangat memengaruhi keberhasilan aksi kolektif. Persepsi aktor juga memengaruhi strategi dan taktik yang akan digunakan. Jika aktor merasa bahwa peluang terbuka, mereka cenderung memilih jalur legal dan diplomatis, sedangkan jika mereka melihat peluang tertutup, mereka mungkin beralih ke aksi radikal atau bahkan kekerasan. Oleh karena itu, persepsi ini bisa jadi berbeda dari kondisi objektif, tergantung dari pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi mereka terhadap situasi politik saat itu. Persepsi aktor tentang POS sangat penting karena memodifikasi atau memperkuat pengaruh dari kondisi objektif yang ada. Persepsi ini dapat mempercepat, menunda, atau bahkan mengubah peluang yang tampaknya tersedia secara struktural. Dengan demikian, keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung tidak hanya pada posisi sistem politik yang objektif, tetapi juga pada bagaimana aktor memahami dan merasakan peluang-peluang yang ada di lingkungan mereka (McAdam, McCarthy, and Zald 1996).

Teori *Political Opportunity Structures* (POS) dapat digunakan dalam penelitian untuk memahami bagaimana kondisi eksternal dalam sistem politik, seperti keterbukaan institusi politik, perpecahan elit, dukungan sekutu, dan kapasitas negara dalam melakukan represi, membuka atau menutup peluang bagi gerakan sosial untuk memobilisasi dan mencapai tujuan politiknya. Selain itu, kerangka ini menekankan pentingnya persepsi aktor dalam menanggapi peluang tersebut sehingga menghasilkan strategi yang efektif, sehingga penelitian tidak

hanya melihat dinamika internal gerakan tetapi juga interaksi gerakan dengan lingkungan politik yang lebih luas, yang sangat penting untuk analisis perubahan sosial dan politik secara menyeluruh. Konsep POS yang ditulis oleh McAdam, McCarthy, dan Zald pada tahun 1996 ini selaras digunakan untuk menjawab rumusan masalah, untuk menjelaskan struktur peluang politik gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017 - 2020 melalui empat dimensi, yaitu aspek *Openness of Political Institutions*, *Elite Division*, *Presence of Allies*, dan *State Capacity for Repression*.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep *Political Opportunity Structure* oleh McAdam, McCarthy, dan Zald pada tahun 1996, simpulan awal dari penelitian ini adalah bahwa dimensi dalam struktur peluang politik memengaruhi gerakan #EndSARS. Yang pertama dilihat dari aspek *openness of political institutions*, Pemerintah Nigeria saat itu memiliki sistem yang terbuka terhadap sebuah gerakan, karena protes ini tetap dapat dilakukan baik melalui media sosial maupun saat turun ke jalan. Namun terbatas karena tingginya tingkat represif pada kelompok protes di jalan. Lalu yang kedua adalah aspek *elite division*, yang mana terdapat *elite division* selama gerakan berlangsung yang dapat dilihat dari perbedaan sikap antara pejabat pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga dilihat dari aspek *presence of allies*, gerakan #EndSARS mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai aktor yang bersimpati dan memperkuat gerakan ini, seperti media, organisasi non-pemerintah khususnya yang bergerak dalam isu HAM, dan selebriti juga mengambil peran disini. Aspek yang keempat adalah *state capacity*

for repression, pada saat gerakan #EndSARS berlangsung represi yang dilakukan oleh negara sendiri cukup keras dan terstruktur.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan strategi penulisan yang berfokus pada analisis data, dan menggunakan metode induktif. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki lima karakteristik yaitu, dapat dilihat langsung dari perspektif narasumber, dapat memberikan deskripsi yang spesifik terhadap suatu hal, bersifat kontekstual dalam melihat suatu masalah, melihat masalah sebagai sebuah proses bukan hal yang statis dan sangat fleksibel atau tidak terikat oleh struktur (Bryman 2012, 3).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017-2020. Sedangkan, objek penelitiannya adalah peluang politik gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017-2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber terdahulu, baik dalam bentuk buku, jurnal, berita maupun website yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan, baik berupa tulisan, tabel maupun gambar dan baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, pada tahap awal peneliti akan melakukan identifikasi mengenai aspek-aspek peluang politik di Nigeria saat terjadi gerakan #EndSARS yang sudah dijabarkan oleh Teori *Political Opportunity Structure*. Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data-data sekunder yakni dari berita, laporan serta jurnal sebagai bahan penunjang penelitian. Setelah lengkap, penulis akan memetakan dan mengolah data tersebut sesuai dengan aspek-aspek pada teori yang penulis gunakan. Setelahnya akan dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam empat bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data serta proses penelitian.

BAB II: DINAMIKA DAN RESPON KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH UNIT SARS DI NIGERIA

Dalam bab 2, penulis akan menjelaskan mengenai dinamika kasus kekerasan yang dilakukan unit SARS di Nigeria, respon warga sipil dan pemerintah. Serta penjelasan terkait gerakan #EndSARS dan bagaimana respon warga sipil Nigeria dan pemerintah Nigeria terhadap gerakan ini.

BAB III: *POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES* GERAKAN #EndSARS

Dalam bab 3, penulis akan menganalisis dimensi peluang politik sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada teori *Political Opportunity Structure* oleh oleh Doug McAdam, Jhon D. McCarthy, dan Mayer N. Zald.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab 4, penulis akan menarik kesimpulan mengenai dimensi peluang politik gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017-2020. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Serta rekomendasi penulis untuk penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

DINAMIKA DAN RESPON KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH UNIT SARS DI NIGERIA

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait dengan konteks empiris yang melatarbelakangi kemunculan dan perkembangan gerakan #EndSARS di Nigeria. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu dinamika kekerasan yang dilakukan oleh unit Special Anti-Robbery Squad (SARS), karakteristik dan perkembangan gerakan #EndSARS sebagai gerakan sosial, serta respons pemerintah dan warga sipil Nigeria terhadap gerakan tersebut dalam periode 2017–2020.

2.1 Kekerasan yang Dilakukan oleh Unit SARS di Nigeria

Unit SARS didirikan pada akhir tahun 1992 sebagai tanggapan terhadap gelombang kejahatan bersenjata yang meningkat di Nigeria (National African Student Association 2020). Unit ini merupakan salah satu dari empat belas divisi yang dibentuk di bawah Departemen Investigasi dan Intelijen Kriminal Kepolisian Nigeria (*Force Criminal Investigation and Intelligence Department - FCIID*). Tugas resmi unit SARS adalah untuk menangkap, menyelidiki, dan menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan kekerasan seperti perampokan bersenjata, pembunuhan, penculikan, pembunuhan bayaran, dan tindak pidana kekerasan lainnya (Okereke et al. 2021, 2).

Dalam operasionalnya, SARS menggunakan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dari unit kepolisian konvensional. Anggota SARS umumnya mengenakan pakaian sipil, menggunakan kendaraan tanpa tanda kepolisian, serta melakukan operasi secara tertutup (R. Chow, 2020). Pola operasional ini dirancang untuk memungkinkan aparat menyusup ke jaringan kriminal dan meningkatkan efektivitas penindakan (Omeni 2022, 12).

Selama satu dekade pertama, SARS hanya beroperasi di Lagos. Namun, pada tahun 2002, unit ini diperluas ke seluruh 36 negara bagian Nigeria serta Federal Capital Territory, Abuja (Al Jazeera 2020). Perluasan cakupan geografis dan fungsional ini menjadi titik balik penting, karena kewenangan luas yang dimiliki SARS tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Berbagai laporan kemudian menunjukkan bahwa kondisi tersebut membuka ruang sistemik bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat (Udenze, Telo, and Pires 2024, 12).

Kasus pelanggaran pertama yang tercatat secara luas melibatkan unit SARS terjadi pada tahun 2004. Seorang mantan tahanan, Ifeanyi Onuchukwu, melaporkan bahwa selama penahanannya di Awka, ia menyaksikan eksekusi terhadap sekitar 20 tersangka pada November 2004 (Open Society Institute 2010, 57). Kasus awal lainnya adalah Moses Akatugba, yang ditangkap pada 2005 saat berusia 16 tahun dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan, termasuk penembakan, pemukulan, dan pencabutan kuku, sebelum dipaksa menandatangani pengakuan yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan vonis mati pada 2013 (Amnesty International 2014). Kedua kasus ini merupakan kasus awal yang tercatat sebagai kasus kekerasan yang melibatkan anggota unit SARS, tahun 2006-2012 tidak terdapat laporan lain yang tercatat melibatkan anggota unit SARS. Hingga laporan berikutnya terjadi pada tahun 2013.

Laporan Amnesty International pada 2013–2016 mendokumentasikan berbagai kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh SARS. Di antaranya adalah kasus Diolu di Port Harcourt pada 2013, mengalami penyiksaan di ruang yang dikenal sebagai “*temple*”, serta dipaksa menandatangani

pernyataan tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui isi dokumen tersebut (Amnesty International 2014). Serta serangkaian kasus pada periode 2014–2015 di Enugu, Awkuzu, Abuja, dan wilayah lainnya yang melibatkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan fisik ekstrem, hingga kematian tahanan dalam custody aparat (Amnesty International 2016).

Memasuki periode 2017–2020, skala dan intensitas pelanggaran semakin terdokumentasi secara sistematis. Amnesty International mencatat setidaknya 82 kasus penyiksaan, perlakuan buruk, dan eksekusi di luar proses hukum yang dilakukan oleh SARS dalam periode tersebut (Amnesty International 2020). Laporan Komisi Kepresidenan tentang Reformasi SARS tahun 2018 juga secara eksplisit mencantumkan tuduhan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum terhadap unit ini (NigeriaRights.gov.ng 2018). Meskipun Undang-Undang Anti-Penyiksaan disahkan pada 2017, otoritas Nigeria secara konsisten gagal menuntut satu pun petugas SARS atas pelanggaran tersebut, menciptakan iklim impunitas yang memperparah krisis hak asasi manusia (ReliefWeb 2021).

Respons warga sipil Nigeria terhadap kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh unit Special Anti-Robbery Squad (SARS) merupakan manifestasi dari akumulasi kemarahan yang memuncak dalam gerakan sosial massa yang dikenal sebagai #EndSARS (Udenze, Telo, and Pires 2024, 14). Kampanye digital #EndSARS yang dimulai pada tahun 2017 yang akhirnya berubah menjadi demonstrasi massa di jalan-jalan pada Oktober 2020 (Ecoma 2023, 159). Kemarahan ini tidak hanya dipicu oleh banyaknya pengalaman pribadi akan penyiksaan, pemerasan, dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan SARS

unit yang telah lama dianggap sebagai simbol represi negara dan impunitas aparat (Agustina and Sudia 2025, 641).

Korban utama pelanggaran SARS adalah generasi muda Nigeria, yang sering ditargetkan secara sewenang-wenang hanya karena atribut seperti ponsel mahal atau penampilan (Amnesty International, 2020). Reaksi awal terjadi di dunia digital dengan kampanye #EndSARS muncul di media sosial twitter, yang sekarang berubah menjadi X sejak 2017, berfungsi sebagai ruang bagi kaum muda untuk berbagi pengalaman traumatis dan menggalang solidaritas di luar kendali politik tradisional (Udenze, Telo, and Pires 2024, 2).

Kegagalan pemerintah dalam menindaklanjuti janji reformasi dan menegakkan akuntabilitas memicu eskalasi protes besar-besaran pada Oktober 2020. Protes ini dipicu oleh beredarnya video yang diduga memperlihatkan seorang petugas SARS menembak mati seorang pemuda di Negara Bagian Delta (Al Jazeera 2020). Tuntutan masyarakat kemudian melampaui sekadar pembubaran SARS, mencakup serangkaian tuntutan komprehensif (lima tuntutan utama) yang menuntut keadilan, kompensasi, reformasi polisi, dan pembentukan badan pengawasan independen, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap korupsi dan ketidakadilan sistemik (detikNews 2020).

Gerakan ini menunjukkan kemampuan organisasi sipil yang luar biasa, didukung oleh *Nigerians in Diaspora* (Martins 2023, 7) dan pendanaan logistik independen oleh kelompok seperti *Feminist Coalition*, menandai kemandirian gerakan dari struktur politik formal (Ekpeowoh, Okon, and Mac-Chile 2024, 2).

Respons Pemerintah Federal Nigeria sendiri terhadap tuduhan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Special Anti-Robbery Squad (SARS)

selama bertahun-tahun didominasi oleh pola berulang berupa janji reformasi dan larangan operasional, namun minim implementasi nyata sebelum unit tersebut akhirnya dibubarkan secara paksa pada tahun 2020 (Al Jazeera 2020). Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengumuman reformasi pada 2016 yang melarang penyiksaan, pembentukan *Complaint Response Unit* (CRU) pada 2015, hingga larangan operasi *stop and search* pada 2017, yang harus diulang pada 2018 dan 2020 karena tidak efektif (Uwazuruike 2021). Bahkan, meskipun Panel Investigasi melalui Komisi Hak Asasi Manusia Nasional pada 2018 merekomendasikan penuntutan terhadap 33 petugas, Jaksa Agung menyatakan tidak cukup bukti setahun kemudian, bertentangan dengan temuan resmi (Uwazuruike 2021). Kegagalan berulang dalam menindaklanjuti janji inilah yang akhirnya memicu protes massal pada Oktober 2020 (Ugwueze 2024, 180).

Menghadapi tekanan publik dan liputan internasional, pemerintah merespons dengan membubarkan SARS pada 11 Oktober 2020 (Al Jazeera, 2020). Namun, kredibilitas keputusan ini diragukan publik karena pemerintah hanya dua hari kemudian mengumumkan pembentukan unit baru bernama Special Weapons and Tactics (SWAT), yang dianggap hanya *rebranding* dan ditolak oleh para pengunjuk rasa (Asogwa et al. 2021, 60). Pemerintah kemudian berupaya meredakan ketegangan dengan menerima lima tuntutan pengunjuk rasa, termasuk kompensasi dan pembentukan Panel Penyelidikan Yudisial di seluruh negara bagian untuk menyelidiki kebrutalan polisi (Human Rights Watch 2021). Walaupun demikian, pemerintah secara bersamaan menggunakan tindakan penindasan untuk membubarkan protes, yang mencapai puncaknya pada insiden penembakan pengunjuk rasa damai di Lekki Toll Gate pada 20 Oktober 2020.

Secara keseluruhan, respons ini menunjukkan resistensi yang mendalam terhadap akuntabilitas hingga aksi massa besar-besaran akhirnya memaksa perubahan struktural (Uwazuruike 2021).

2.2 Gerakan #EndSARS

Gerakan #EndSARS merupakan sebuah gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat sipil Nigeria terhadap praktik kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh unit Special Anti-Robbery Squad (SARS). Gerakan ini secara spesifik menuntut pembubaran SARS serta mendorong reformasi kepolisian yang lebih akuntabel dan menghormati hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, #EndSARS tidak hanya menjadi protes terhadap satu unit kepolisian, tetapi juga berkembang menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik impunitas aparat dan kegagalan negara dalam melindungi warganya (Omeni 2022, 24).

#EndSARS dapat dipahami sebagai gerakan protes sosial berbasis masyarakat sipil yang memanfaatkan kombinasi aktivisme digital dan mobilisasi massa di ruang publik. Gerakan ini berangkat dari kritik terhadap kebrutalan polisi yang dilakukan oleh unit SARS, yang selama bertahun-tahun terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerasan, serta pembunuhan di luar proses hukum (Amnesty International 2020). Praktik-praktik tersebut menjadikan SARS sebagai simbol represi negara dan ketidakadilan struktural dalam sistem penegakan hukum Nigeria (Al Jazeera 2020).

Tagar #EndSARS pertama kali digunakan oleh warga sipil Nigeria pada tahun 2017. Tagar ini pertama kali dipelopori dan dipopulerkan oleh seorang

pengacara bernama Segun Awosanya melalui akun twitternya yang bernama @/segalink (Agustina and Sudia 2025, 638). Tagar ini digunakan sebagai bentuk protes mereka terhadap apa yang dilakukan unit kepolisian tersebut. Tagar ini juga digunakan untuk membagikan video maupun foto bukti atas kekerasan yang dilakukan oleh unit SARS, dan juga untuk menceritakan pengalaman mereka pribadi atas kekerasan yang mereka alami.

Gambar 1. Postingan Seruan Menggunakan Tagar #EndSARS

← Post

Reply



SEGA L'éveilleur® @segalink · Dec 4, 2017



The general public should be aware that this is not an attempt at defaming the @PoliceNG, we are only stating the facts based on their impunity thus far. State your experience clearly, highlighting the date, specific location and time of day. Pictures & videos welcome. #EndSARS



27

1.1K

293



← Post

Reply



SEGA L'éveilleur® @segalink

Subscribe



Those who may have transferred money to SARS or have any actionable claim of abuse (not opinions or third party reports) should DM. I need a few to add to a report. Please spread the word. Time, Date and Location essential. #EndSARS #ReformPoliceNG

4:52 AM · Dec 4, 2017

15

1.1K

203



Sumber: Akun x @/segalink 2017

Aktor utama dalam gerakan #EndSARS adalah pemuda Nigeria, yang selama ini menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pemrofilan dan kekerasan yang dilakukan oleh unit SARS. Melalui pemanfaatan teknologi digital, kelompok ini membangun jaringan horizontal yang inklusif dan efisien untuk mengorganisir pemuda turun ke jalan secara massal dengan protes damai di

hampir setiap kota di Nigeria. Meskipun protes ini bersifat terdesentralisasi namun lima tuntutan utama dapat disepakati secara luas. Selain para pemuda sebagai motor penggerak, gerakan ini memperoleh dukungan luas dari berbagai aktor bahkan hingga selebriti internasional (Orjinmo 2020).

Aktivis dan organisasi masyarakat sipil, termasuk Amnesty International dan juga kelompok advokasi lokal, menyediakan dukungan logistik, bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap, serta melakukan pendokumentasian sistematis terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Amnesty International 2021). Dukungan signifikan juga datang dari selebritas dan influencer yang memanfaatkan *platform* mereka untuk memvalidasi tuntutan para pengunjuk rasa dan memperkuat gaung gerakan di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, diaspora Nigeria di berbagai wilayah, seperti di Eropa, Amerika Utara, hingga Afrika juga ikut mengorganisasi demonstrasi solidaritas yang berperan penting dalam menarik perhatian media internasional sekaligus meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Pemerintah Nigeria (Martins 2023, 7)

Gerakan #EndSARS berpusat di Nigeria dengan aksi demonstrasi yang terjadi di lebih dari dua puluh negara bagian, termasuk Lagos, Abuja, Port Harcourt, Ibadan, Enugu, dan Benin City (Amnesty International 2021). Namun demikian, gerakan ini juga memiliki dimensi transnasional yang kuat. Diaspora Nigeria di berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, mengorganisasi aksi solidaritas di depan kedutaan Nigeria serta menggalang dukungan internasional melalui media sosial dan kampanye daring (Martins 2023, 7).

Gerakan #EndSARS berkaitan erat dengan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kekerasan aparat, impunitas institusional, serta kegagalan negara dalam menegakkan supremasi hukum. Berbagai laporan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Anti-Penyiksaan disahkan pada tahun 2017, pemerintah Nigeria secara konsisten gagal menuntut anggota SARS yang terlibat dalam pelanggaran berat (Amnesty International 2020). Janji reformasi kepolisian yang berulang, namun tidak diikuti oleh implementasi yang nyata, memperkuat persepsi publik bahwa negara tidak memiliki komitmen serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (Uwazuruike 2021).

Gerakan #EndSARS memobilisasi dukungan melalui strategi yang menggabungkan aktivisme digital dan aksi kolektif di ruang publik. Media sosial, khususnya Twitter sekarang X, berfungsi sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi, mendokumentasikan kekerasan aparat, serta mengoordinasikan aksi protes. Tagar #EndSARS menjadi alat *framing* yang efektif dalam membangun solidaritas lintas wilayah dan menarik perhatian global (Udenze, Telo, and Pires 2024, 2).

Pada Oktober 2020, sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan penembakan seorang pemuda oleh aparat SARS di Negara Bagian Delta menjadi pemicu langsung gelombang protes massal (Al Jazeera 2020). Aksi demonstrasi kemudian berlangsung secara serentak di berbagai kota besar Nigeria sejak 8 Oktober 2020. Di bawah tekanan publik yang intens, pemerintah Nigeria akhirnya mengumumkan pembubaran unit SARS pada 11 Oktober 2020. Namun, keputusan tersebut direspons dengan skeptisisme karena diikuti dengan

pembentukan unit baru bernama Special Weapons and Tactics (SWAT), yang dipersepsikan sebagai bentuk reformasi simbolik semata (BBC News 2020).

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap langkah pemerintah mendorong perluasan tuntutan gerakan yang dikenal sebagai *Five for Five Demands*, mencakup pembebasan demonstran yang ditahan, kompensasi bagi korban kekerasan polisi, pembentukan badan pengawas independen, evaluasi psikologis petugas, serta peningkatan kesejahteraan polisi (TheCable 2020). Puncak eskalasi terjadi pada 20 Oktober 2020 dalam insiden penembakan demonstran damai di Lekki Toll Gate, Lagos, yang menewaskan dan melukai warga sipil, serta memicu kecaman nasional dan internasional terhadap pemerintah Nigeria (Amnesty International 2021).

Dilihat dari transformasi mobilisasi gerakan #EndSARS, dapat dikatakan ini merupakan gerakan sosial karena tetap memenuhi unsur *mobilizing structures*, *framing processes*, dan *contentious collective action*. Unsur *mobilizing structures* dapat dilihat dari pemanfaatan media sosial dan jaringan komunitas desentralisasi yang memungkinkan koordinasi massa secara masif tanpa pemimpin tunggal. Keberhasilan ini didukung oleh infrastruktur logistik yang kuat, seperti penggalangan dana melalui *cryptocurrency* oleh *Feminist Coalition* untuk menyediakan bantuan medis, hukum, dan kebutuhan dasar bagi para demonstran. Lalu gerakan ini melalui *framing processes*, dimana tagar #EndSARS sendiri adalah bingkai yang menyederhanakan masalah kompleks menjadi tuntutan yang mudah dipahami dan didukung. *Contentious collective action* dalam gerakan #EndSARS mewujud melalui aksi protes jalanan massal dan pendudukan ruang publik strategis, seperti Tol Lekki di Lagos, untuk menantang otoritas kepolisian

dan menuntut pembubaran unit SARS secara permanen. Tindakan ini mencakup klaim kolektif yang konfrontatif namun terorganisir, di mana masyarakat secara langsung mengganggu stabilitas status quo guna menekan pemerintah agar melakukan reformasi keamanan yang nyata. Meskipun awalnya berbentuk pertukaran informasi di media sosial, aktivitas tersebut berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas kolektif dan artikulasi klaim politik terhadap negara. Oleh karena itu, fase digital #EndSARS bukan sekadar percakapan publik, melainkan tahap awal mobilisasi gerakan sosial yang kemudian mengalami eskalasi menjadi aksi demonstrasi massal pada tahun 2020.

2.3 Respon Pemerintah dan Warga Sipil Nigeria terhadap Gerakan #EndSARS

Respon terhadap gerakan #EndSARS memperlihatkan dinamika relasi yang kompleks antara negara dan masyarakat sipil di Nigeria. Sejak kemunculan awal kampanye #EndSARS pada 2017 hingga eskalasi nasional pada 2020, interaksi antara pemerintah Nigeria dan warga sipil tidak hanya mencerminkan konflik terkait isu kekerasan kepolisian, tetapi juga mengungkap krisis legitimasi negara, rendahnya akuntabilitas institusi keamanan, serta meningkatnya kapasitas mobilisasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, respons pemerintah dan warga sipil tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai proses timbal balik yang saling memengaruhi dalam membentuk arah dan intensitas gerakan sosial.

2.3.1 Respon Pemerintah terhadap Gerakan #EndSARS

Respons Pemerintah Nigeria terhadap gerakan #EndSARS sejak 2017 menunjukkan pola yang cenderung defensif, reaktif, dan inkonsisten. Pada tahap

awal kemunculan kampanye #EndSARS di media sosial, pemerintah federal dan institusi kepolisian Nigeria menolak legitimasi tuntutan warga sipil. Laporan-laporan mengenai penyiksaan, pemerasan, dan pembunuhan di luar hukum oleh unit SARS kerap dibantah atau dianggap sebagai informasi yang dilebih-lebihkan dan berpotensi merusak citra kepolisian. Sikap penyangkalan ini mencerminkan kecenderungan negara untuk mempertahankan otoritas institusi keamanan daripada mengakui kegagalan struktural dalam penegakan hukum (Amnesty International Nigeria 2020).

Sebagai respons awal terhadap tekanan publik, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah reformasi yang bersifat administratif, seperti pembentukan *Police Duty Solicitors* melalui *Force Order* pada 2017. Mekanisme ini diklaim bertujuan mencegah pelanggaran prosedural dalam proses penegakan hukum dengan menyediakan bantuan hukum gratis bagi tersangka. Namun, organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan ini sebagai reformasi kosmetik karena tidak disertai mekanisme pengawasan independen maupun sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran di tubuh SARS (Amnesty International 2021).

Pada 2018, tekanan warga sipil mendorong pemerintah menunjukkan pengakuan formal terhadap permasalahan SARS. Wakil Presiden Nigeria saat itu menginstruksikan pembentukan panel investigasi yudisial di bawah Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC). Panel ini menerima lebih dari seratus pengaduan terkait pelanggaran berat, termasuk penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, serta merekomendasikan pemecatan dan penuntutan terhadap sejumlah petugas SARS (NigeriaRights.gov.ng 2018). Namun, temuan Amnesty International menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi panel tersebut

tidak ditindaklanjuti secara efektif hingga 2020, sehingga memperkuat persepsi impunitas aparat (Amnesty International 2020).

Ketidakmampuan negara untuk merealisasikan janji reformasi secara substansial menjadi faktor penting yang memicu eskalasi gerakan #EndSARS pada Oktober 2020. Ketika Inspektur Jenderal Polisi mengumumkan pembubaran unit SARS pada 11 Oktober 2020, langkah tersebut tidak disambut sebagai solusi, melainkan sebagai pengulangan janji lama yang sebelumnya gagal direalisasikan. Keputusan pemerintah membentuk unit baru Special Weapons and Tactics (SWAT) justru memperkuat kecurigaan publik bahwa negara hanya mengganti nama tanpa mengubah praktik kekerasan yang mengakar (BBC News 2020).

Ketegangan antara negara dan warga sipil mencapai titik balik krusial pada 20 Oktober 2020 dalam peristiwa yang dikenal sebagai insiden penembakan Lekki Toll Gate di Lagos. Respon pemerintah Nigeria terhadap gerakan #EndSARS dalam peristiwa di Lekki Toll Gate di Lagos menunjukkan sikap yang cukup represif. Dimana, pada malam tersebut setelah pemerintah negara bagian Lagos memberlakukan jam malam 24 jam, personel berseragam militer diduga menembaki demonstran damai yang berkumpul di Lekki Toll Gate. Para demonstran dilaporkan sedang mengibarkan bendera nasional Nigeria dan menyanyikan lagu kebangsaan ketika penembakan terjadi. Insiden ini didokumentasikan secara luas melalui siaran langsung media sosial dan laporan jurnalis, sehingga memicu kecaman domestik dan internasional yang luas terhadap pemerintah Nigeria (Amnesty International 2021).

Respons resmi pemerintah terhadap insiden Lekki bersifat inkonsisten dan kontroversial. Pada tahap awal, pihak militer Nigeria menyangkal keterlibatannya,

sementara pernyataan resmi lainnya mengklaim bahwa pasukan hanya menembakkan peluru hampa ke udara. Menteri Informasi dan Kebudayaan, Lai Mohammed, secara berulang menyangkal adanya korban jiwa. Pernyataan-pernyataan ini secara luas dipandang sebagai upaya penutupan (cover-up) yang semakin merusak kredibilitas pemerintah di mata publik dan komunitas internasional (Egbejule 2021). Secara keseluruhan, respons pemerintah Nigeria terhadap gerakan #EndSARS menunjukkan pola yang berulang yang mana cenderung menyangkal dan juga bersikap represif.

2.3.2 Respon Warga Sipil Nigeria terhadap Gerakan #EndSARS

Warga sipil Nigeria memberikan respon baik sejak awal kemunculan gerakan #EndSARS dengan kampanye media sosial yang dimulai pada 2017, dimana ribuan orang menggunakan hashtag tersebut untuk mendokumentasikan kekerasan polisi SARS dan menuntut pembubaran unit tersebut. Aktivis seperti Segun Awosanya mempopulerkan *hashtag* #EndSARS di Twitter, mengumpulkan ribuan cerita korban tentang pemerasan, penyiksaan, dan eksekusi ekstrapudisial yang menargetkan pemuda urban kaya. Respons baik ini mencakup petisi online pertama yang ditandatangani puluhan ribu orang, memaksa pemerintah federal mengumumkan investigasi awal, meskipun minim tindak lanjut nyata (Agustina and Sudia 2025, 638).

Memasuki tahun 2018, respons warga sipil Nigeria terhadap gerakan #EndSARS menunjukkan tingkat koordinasi yang semakin kuat, terutama melalui pemanfaatan media sosial. Warga sipil, khususnya kaum muda perkotaan, secara aktif membagikan kesaksian korban dan juga dokumentasi pelanggaran yang dilakukan oleh unit SARS, sehingga memperluas kesadaran publik terhadap

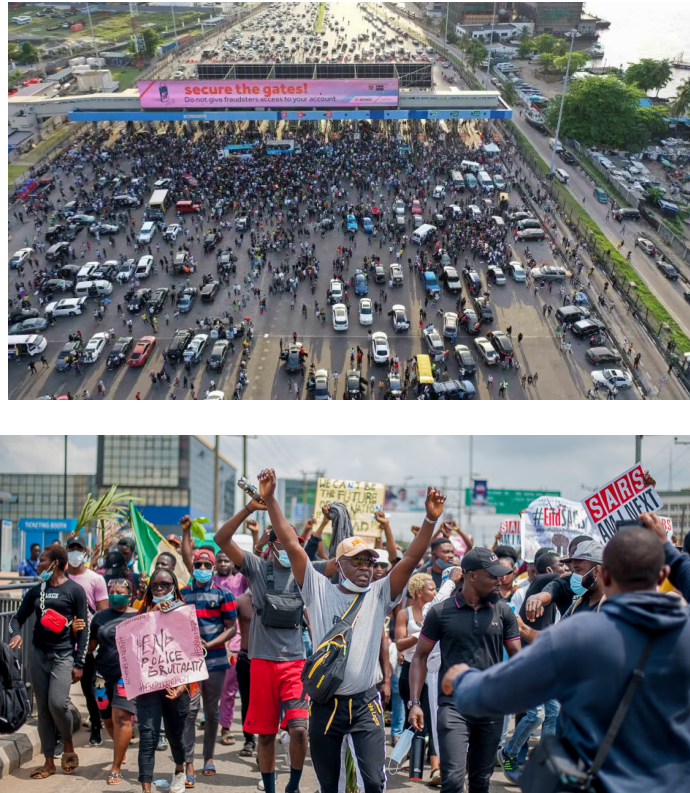
praktik kekerasan polisi (Uwazuruike 2020). Aktivisme digital ini kemudian mendorong terbentuknya jaringan solidaritas informal di berbagai kota, serta membuka ruang partisipasi bagi diaspora Nigeria di Amerika Serikat dan Eropa yang turut memberikan dukungan melalui kampanye daring dan petisi internasional (Agustina and Sudia 2025, 647). Dengan demikian, sejak 2018, #EndSARS tidak hanya berkembang sebagai isu domestik, tetapi juga mulai memperoleh perhatian di tingkat transnasional.

Pada tahun 2019, respons warga sipil Nigeria terhadap gerakan #EndSARS semakin terorganisasi dan intens, ditandai oleh aksi protes publik di Lagos serta penguatan jaringan advokasi berbasis digital (Uwazuruike, 2020). Warga sipil secara aktif mendokumentasikan kasus kekerasan polisi, mengawasi mekanisme reformasi yang dibentuk pemerintah, dan mempertahankan tekanan publik karena reformasi tersebut dipandang simbolik dan tidak menyentuh persoalan impunitas aparat (Amnesty International, 2021). Respons ini menunjukkan konsolidasi awal gerakan #EndSARS sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan menjelang eskalasi besar pada 2020 (Iwuoha, 2021).

Puncak respons warga sipil terjadi pada 2020, ketika video penembakan oleh anggota SARS terhadap seorang pemuda tidak bersenjata menjadi viral dan memicu mobilisasi nasional. Aksi protes berlangsung di berbagai kota besar seperti Lagos, Abuja, Port Harcourt, dan Ibadan, menandai transformasi #EndSARS dari kampanye digital menjadi gerakan sosial nasional. Warga sipil tidak hanya mengandalkan demonstrasi jalanan, tetapi juga membangun infrastruktur pendukung gerakan, termasuk penggalangan dana, bantuan hukum,

dan layanan medis yang banyak dikoordinasikan oleh kelompok seperti Feminist Coalition (Omotoso and Faniyi 2024).

Gambar 2. Gerakan #EndSARS Turun ke Jalan



Sumber: PIERRE FAVENNEC/AFP 2017

Selain itu, kreativitas warga sipil dalam menggunakan seni, musik, dan vigil damai memperkuat legitimasi moral gerakan dan menarik simpati publik yang lebih luas (CNN 2020). Solidaritas lintas kelas, generasi, dan wilayah, termasuk keterlibatan selebritas dan diaspora, menunjukkan bahwa #EndSARS telah melampaui isu kekerasan kepolisian semata dan berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan krisis akuntabilitas negara (Martins 2023, 7). Secara keseluruhan, respons warga sipil Nigeria terhadap gerakan #EndSARS mencerminkan peningkatan kapasitas mobilisasi masyarakat dalam menghadapi negara yang represif.

**Tabel 1. Perbandingan Respon Pemerintah Nigeria dan Warga Sipil Nigeria
terhadap Gerakan #EndSARS dari Tahun 2017-2020**

Tahun	Respon Pemerintah Nigeria	Respon Warga Sipil Nigeria
2017	Cenderung melakukan penyangkalan & defensif. Menolak legitimasi kampanye, melabeli laporan kekerasan sebagai berita bohong (<i>hoax</i>).	Mendukung kampanye #EndSARS secara masif di media sosial untuk menuntut pembubaran SARS. Puluhan ribu orang menandatangani petisi online pertama.
2018	Pemerintah mulai ada pengakuan formal. Dimana Wakil Presiden memerintahkan reformasi segera. Membentuk panel investigasi yudisial oleh NHRC.	Koordinasi semakin kuat melalui media sosial. Warga aktif membagikan kesaksian korban dan dokumentasi pelanggaran. Muncul dukungan dari diaspora di luar negeri.
2019	Di tahun ini Pemerintah cenderung bersikap stagnan. Dimana panel investigasi merekomendasikan pemecatan 37 petugas, namun sebagian besar rekomendasi tidak dilaksanakan.	Respon semakin terorganisasi dan intens dengan aksi protes publik di Lagos. Warga tetap skeptis dan terus mengawasi mekanisme reformasi pemerintah yang dianggap simbolik.
2020	Pemerintah cenderung Represif dan Inkonsisten. Dimana mengumumkan pembubaran SARS tetapi langsung membentuk SWAT. Puncaknya adalah insiden penembakan Lekki Toll Gate.	Mencapai puncak mobilisasi nasional dengan protes massal di berbagai kota. Membentuk infrastruktur gerakan yang matang (penggalangan dana, bantuan hukum, medis).

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2017 - 2020

BAB III

POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES GERAKAN #EndSARS

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait dimensi *Political Opportunity Structures* dalam gerakan #EndSARS di Nigeria tahun 2017 -2020 sesuai dengan dimensi yang ditulis oleh Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald dalam buku *Comparative Perspectives on Social Movement* pada tahun 1996. Pembahasan difokuskan pada empat dimensi utama, yaitu aspek *Openness of Political Institutions*, *Elite Division*, *Presence of Allies*, dan *State Capacity for Repression*.

3.1 *Openness of Political Institutions* dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

Keterbukaan institusi politik di suatu negara sangat berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya sebuah gerakan masyarakat. Gerakan akan lebih mudah muncul dan berkembang kalau lembaga politik bisa diakses oleh kelompok masyarakat atau kelompok penekan. Semakin terbuka sistem politik, maka semakin besar juga kesempatan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan mereka lewat jalur yang legal. Selain itu, masyarakat juga bisa menyuarakan pendapatnya langsung ke lembaga yang berwenang tanpa harus selalu melakukan aksi di jalan. Hal ini membuat tuntutan yang disampaikan bisa lebih terarah dan punya peluang lebih besar untuk didengar. Jadi, keterbukaan lembaga politik punya peran penting dalam keberhasilan sebuah gerakan masyarakat (McAdam, McCarthy, and Zald 1996).

Sejak 2017, berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia internasional menunjukkan adanya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh unit SARS. Laporan-laporan tersebut tidak hanya mengungkap penyiksaan dan juga penahanan sewenang-wenang, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam tubuh institusi

kepolisian Nigeria. Meskipun informasi tersebut telah disampaikan secara luas kepada publik dan pemerintah, respons institusi politik negara cenderung terbatas dan tidak diikuti oleh reformasi struktural yang konsisten. Laporan-laporan mengenai penyiksaan, pemerasan, dan pembunuhan di luar hukum oleh unit SARS bahkan kerap dibantah atau dianggap sebagai informasi yang dilebih-lebihkan dan berpotensi merusak citra kepolisian. Keterbatasan keterbukaan institusi politik tersebut juga tercermin dalam peran lembaga legislatif dan yudikatif yang relatif lemah dalam mendorong adanya reformasi sektor keamanan. Proses legislasi terkait pengawasan kepolisian dan penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran jarang menghasilkan perubahan yang substantif (Solomon 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa pada tahun 2017, pada awal kemunculan gerakan ini negara memang terbuka dan tidak membatasi adanya gerakan ini muncul, hanya saja negara juga belum menyediakan saluran institusional yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan dan juga memperoleh penyelesaian yang memadai (Amnesty International 2020).

Dalam kondisi keterbukaan institusi politik tersebut, Dimana ruang partisipasi politik formal tidak sepenuhnya mampu menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini mendorong munculnya strategi mobilisasi alternatif melalui media digital. Sejak 2017, kampanye #EndSARS mulai berkembang di media sosial, khususnya di X sebagai sarana untuk menyampaikan pengalaman korban, membangun kesadaran kolektif, dan juga mengorganisasi dukungan publik. Penggunaan media sosial sebagai ruang gerak ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi gerakan terhadap keterbatasan peluang

politik formal, di mana ruang digital berfungsi sebagai arena politik alternatif yang relatif lebih terbuka dibandingkan institusi negara (Makinde 2024).

Lalu pada tahun 2018, institusi politik mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap gerakan, dimana pemerintah memberikan "sinyal keterbukaan" ini melalui perintah Wakil Presiden Osinbajo untuk merestrukturisasi SARS dan pembentukan Panel Investigasi Kepresidenan oleh Komisi HAM Nasional (NHRC). Namun, sayangnya saat itu yang dilakukan hanya *rebranding*, yaitu merubah nama menjadi FSARS, tanpa mengubah mekanisme akuntabilitas hukum. Ketimpangan antara politik yang terbuka dan praktik lapangan yang represif justru memperkuat narasi ketidakpercayaan publik. Secara teoritis, celah ini menciptakan kekecewaan kolektif yang menjadi modal politik bagi eskalasi gerakan #EndSARS yang jauh lebih masif pada tahun 2020 (NigeriaRights.gov.ng 2018).

Memasuki periode 2019 Panel Investigasi Kepresidenan telah menyerahkan laporan resmi yang merekomendasikan pemecatan dan penuntutan terhadap puluhan anggota SARS, namun Presiden Muhammadu Buhari tidak segera mengambil tindakan nyata untuk mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang sempat terlihat pada tahun sebelumnya hanyalah formalitas administratif tanpa kemauan politik yang kuat. Alih-alih melakukan reformasi, institusi keamanan justru memperketat pengawasan terhadap para aktivis (Human Right Watch 2019).

Tahun 2020 menjadi titik balik paling kritis bagi gerakan #EndSARS, walaupun saat itu negara tidak melarang adanya aksi di jalan namun negara melakukan berbagai bentuk represi. Setelah video kekerasan polisi kembali viral

pada awal Oktober, pemerintah sempat menunjukkan keterbukaan terbatas dengan membubarkan SARS untuk kelima kalinya dalam satu dekade dan pembentukan unit SWAT sebagai pengganti. Namun, massa yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji administratif sejak 2018–2019 terus bertahan di jalanan untuk menuntut perubahan sistemik. Puncak dari penutupan ruang politik terjadi pada 20 Oktober 2020 dalam peristiwa Penembakan Gerbang Tol Lekki, di mana militer melepaskan tembakan terhadap pengunjung rasa yang damai. Pasca insiden tersebut, institusi negara justru cenderung menyangkal fakta, membekukan rekening para aktivis, dan memperketat pengawasan digital guna meredam gerakan. Respons pemerintah Nigeria terhadap gelombang protes 2020 menunjukkan adanya keterbukaan institusi politik yang bersifat reaktif. Pemerintah mengumumkan pembubaran unit SARS, dan pembentukan unit kepolisian baru, serta pembentukan panel investigasi di sejumlah negara bagian. Namun, berbagai kajian menilai bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan institusional yang berkelanjutan, karena tidak disertai reformasi struktural yang menyeluruh maupun mekanisme pengawasan yang kuat (Bello, Alhassan, and Inuwa-Dutse 2023).

Secara keseluruhan, Dalam kerangka POS, keterbukaan institusi politik biasanya diasumsikan sebagai faktor yang memfasilitasi mobilisasi melalui jalur formal. Namun, kasus #EndSARS menunjukkan pola yang lebih kompleks, di mana keterbukaan institusional bersifat terbatas dan ambigu. Sejak tahun 2017 hingga 2019, pemerintah Nigeria memang menunjukkan keterbukaan melalui pembentukan panel investigasi dan janji reformasi serta tidak adanya larangan melakukan aksi protes. Akan tetapi, keterbukaan ini bersifat simbolik karena tidak

diikuti dengan implementasi kebijakan yang substantif. Kondisi ini tidak meredam gerakan, melainkan memicu eskalasi. Dengan demikian, dalam konteks #EndSARS, keterbukaan institusi politik saat itu memang terbuka, namun institusi politik tidak berfungsi sebagai kanal resolusi konflik, tetapi justru sebagai pemicu delegitimasi negara, yang memperkuat justifikasi moral bagi aksi kolektif yang lebih luas.

Tabel 2. Perkembangan Keterbukaan Institusi Politik Nigeria terhadap Gerakan #EndSARS dari Tahun 2017-2020

Tahun	Status Keterbukaan	Bukti dan Peristiwa Utama
2017	Terbuka, Terbatas	Negara saat itu tidak melakukan pembatasan terhadap hadirnya gerakan, namun negara juga belum menyediakan saluran institusional yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan.
2018	Terbuka, Terbatas	Keterbukaan semakin meluas dimana akhirnya melalui perintah Wakil Presiden Osinbajo untuk merestrukturisasi SARS dan pembentukan Panel Investigasi Kepresidenan.
2019	Terbuka, Terbatas	Keterbukaan institusi masih terbatas karena keterbukaan hanya menjadi formalitas administratif karena Presiden Muhammadu Buhari tidak segera mengimplementasikan rekomendasi pemecatan anggota SARS.
2020	Terbuka, Represif	Saat tahun 2020 negara memang tidak secara langsung membatasi gerakan namun saat gerakan ini turun kejalan negara melakukan Tindakan represif. Dengan memberlakukan jam malam, penembakan gas air mata, penembakan Gerbang Tol Lekki oleh militer terhadap pengunjung rasa damai. Pasca insiden, pemerintah

		membekukan rekening aktivis dan memperketat pengawasan digital.
--	--	---

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2017 - 2020

3.2 *Elite Division* dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

Perpecahan antara elit dalam merespons atau menghadapi sebuah gerakan masyarakat dapat menciptakan peluang bagi gerakan tersebut untuk berkembang dan menjangkau ruang yang lebih luas. Kondisi ini biasanya muncul ketika tidak ada kesepakatan yang solid di antara para elit mengenai cara menyikapi tuntutan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sistem politik menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan sepenuhnya oleh satu aktor saja. Ketidakstabilan tersebut justru membuka ruang bagi gerakan masyarakat untuk masuk dan memengaruhi arah perubahan. Selain itu, kekuatan politik yang sedang berubah-ubah membuat posisi negara atau elit menjadi lebih rentan terhadap tekanan publik. Pada akhirnya, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh gerakan untuk memperkuat pengaruh dan mendorong perubahan yang lebih signifikan (McAdam, McCarthy, and Zald 1996).

Dalam konteks Nigeria, sistem politik didominasi oleh kelompok elit yang mencakup pejabat pemerintah, militer berpangkat tinggi, birokrat senior, serta oligarki bisnis di sektor minyak. Kelompok ini disebut sebagai elit karena memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi, kekuasaan politik, dan kemampuan dalam memengaruhi kebijakan publik. Mereka beroperasi melalui jaringan patronase dan praktik *godfatherisme*, yaitu relasi patron-klien di mana aktor berpengaruh memberikan dukungan finansial dan politik kepada kandidat

tertentu dengan imbalan kontrol atas kebijakan dan distribusi kekuasaan (FOFAH 2025, 9). Dalam praktiknya, konfigurasi elit ini sering kali mengarahkan kebijakan publik untuk kepentingan akumulasi kekayaan dan pelestarian status quo, sehingga menghambat reformasi struktural dan memperdalam ketimpangan (Adebanwi and Obadare 2013).

Pada tahun 2017, fase awal kemunculan kampanye #EndSARS menunjukkan adanya perpecahan di antara elit politik, khususnya antara partai penguasa All Progressives Congress (APC) dan oposisi utama Peoples Democratic Party (PDP). Kedua aktor ini dapat dikategorikan sebagai elit karena menguasai struktur partai besar, memiliki akses terhadap institusi negara, serta berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional. Perdebatan antara APC dan PDP, misalnya di Rivers State, menunjukkan perbedaan sikap dalam memandang isu kekerasan polisi, dimana isu tersebut tidak lagi sekadar persoalan keamanan, tetapi telah menjadi bagian dari kontestasi politik antar elit. Saat itu partai All Progressives Congress (APC) mendukung keberadaan SARS, sementara partai Peoples Democratic Party (PDP) mendukung gerakan #EndSARS (Vanguard 2017).

Memasuki tahun 2018, perpecahan elit semakin terlihat jelas dalam struktur internal pemerintahan, khususnya antara Presiden Muhammadu Buhari dan Wakil Presiden Yemi Osinbajo. Sebagai bagian dari elit eksekutif, keduanya memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan negara, namun menunjukkan respons yang berbeda terhadap isu #EndSARS. Ketika Buhari berada di luar negeri, Osinbajo sebagai Pelaksana Tugas Presiden mengambil langkah progresif dengan memerintahkan reformasi SARS. Namun, kebijakan ini berbenturan

dengan elit keamanan, yaitu kepemimpinan kepolisian, yang merespons secara minimal dengan hanya mengganti nama unit menjadi FSARS tanpa perubahan substansial (Olufemi 2018). Perbedaan ini mencerminkan konflik antara elit pembuat kebijakan yang cenderung responsif terhadap tekanan publik dan elit pelaksana yang berupaya mempertahankan praktik lama. Ketidaksinkronan tersebut memperlihatkan lemahnya koordinasi dalam struktur negara sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa reformasi yang dilakukan bersifat simbolik.

Pada tahun 2019, pola perpecahan elit bergeser ke dalam relasi antara elit hukum dan elit eksekutif-keamanan. Pemerintah melalui Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) membentuk Panel Investigasi Kepresidenan sebagai respons terhadap tuntutan publik. NHRC sebagai bagian dari elit institusional memiliki legitimasi dalam mendorong akuntabilitas, sementara pihak kepresidenan dan aparat keamanan tetap memegang kendali atas implementasi kebijakan. Meskipun panel tersebut merekomendasikan tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh FSARS, tidak ada langkah eksekutif yang segera diambil oleh Presiden Buhari (Presidential Villa State House 2019). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara elit yang mendorong reformasi berbasis hukum dan elit yang mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Bagi para aktivis, kondisi ini memperkuat anggapan bahwa mekanisme formal negara hanya berfungsi sebagai alat penundaan, bukan penyelesaian. Akibatnya, tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat, dan tuntutan gerakan menjadi lebih radikal.

Puncak perpecahan elit terjadi pada tahun 2020, ketika konflik tidak hanya berlangsung secara horizontal antar aktor, tetapi juga secara vertikal antar tingkat

pemerintahan. Pada awal demonstrasi nasional, pemerintah pusat di bawah Presiden Buhari mengumumkan pembubaran SARS dan pembentukan SWAT, namun kebijakan ini ditolak oleh publik karena dianggap tidak substantif. Di sisi lain, elit keamanan tetap menggunakan pendekatan represif terhadap demonstran, yang menunjukkan pertentangan antara keputusan formal pemerintah dan praktik di lapangan. Perpecahan juga terlihat antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, khususnya antara Presiden Buhari dan Gubernur Lagos Babajide Sanwo-Olu. Sebagai elit daerah, Sanwo-Olu berupaya mengambil posisi moderat dengan mendukung dialog, sementara kendali atas militer tetap berada di pemerintah pusat. Ketidaksinkronan ini mencapai titik kritis dalam peristiwa penembakan di Lekki Toll Gate pada 20 Oktober 2020, yang memperlihatkan konflik antara elit sipil dan elit militer dalam merespons gerakan (Human Right Watch 2020). Selain itu, terdapat pula polarisasi antara elit yang mendukung reformasi kepolisian dan elit yang menekankan stabilitas keamanan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, perpecahan elit pada 2020 bersifat multidimensional dan mencerminkan krisis koordinasi dalam negara.

Secara keseluruhan, dalam konteks gerakan #EndSARS, perpecahan elit berfungsi sebagai peluang politik yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, memperlemah kapasitas negara dan membuka ruang bagi mobilisasi yang lebih luas, serta meningkatkan legitimasi gerakan. Namun di sisi lain, sifatnya yang terbatas dan tidak terinstitusionalisasi membuat peluang tersebut tidak mampu mendorong perubahan struktural yang berkelanjutan.

**Tabel 3. Perpecahan Elit yang Terjadi di Nigeria dalam Merespon
Gerakan #EndSARS dari Tahun 2017-2020**

Tahun	Pihak yang Terbelah / Aktor Utama	Bentuk Perpecahan & Sikap	Kepentingan Elit
2017	APC vs PDP	Perdebatan terbuka antar partai mengenai #EndSARS	Kontestasi politik antara partai APC vs PDP
2018	Presiden (Buhari) vs Wakil Presiden (Osinbajo); Elit eksekutif vs elit kepolisian	Osinbajo bersikap progresif dengan memerintah perombakan SARS, namun kepolisian hanya melakukan perubahan simbolik (FSARS).	Osinbajo: Akuntabilitas hukum dan respons terhadap kemarahan publik Kepolisian: mempertahankan praktik lama dan kewenangan institusional
2019	Elit Hukum (NHRC) vs. Elit Keamanan & Kepresidenan	Rekomendasi reformasi dari panel investigasi tidak ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah.	NHRC: mendorong akuntabilitas dan keadilan; Pemerintah & aparat: meredam isu tanpa perubahan signifikan, menjaga stabilitas politik
2020	Pemerintah Negara Bagian (Gubernur) vs. Pemerintah Federal (Militer)	Gubernur (seperti Babajide Sanwo-Olu) mencoba menjadi mediator, sementara Pemerintah Pusat/Militer menggunakan tindakan represif (penembakan di tol Lekki).	Gubernur: Dialog dan mediasi untuk stabilitas daerah. Militer/Pusat: Mempertahankan otoritas dan kontrol penuh melalui kekuatan fisik/represi.

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2017 - 2020

3.3 Presence of Allies dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

Dalam gerakan masyarakat, kehadiran kelompok-kelompok sekutu seperti media, LSM, serta kelompok elit yang bersimpati memiliki peran penting dalam memperkuat tuntutan sebuah gerakan. Kelompok-kelompok ini dapat membantu menyuarakan isu yang diperjuangkan agar lebih dikenal oleh publik luas. Dukungan media, misalnya, membuat pesan gerakan lebih mudah tersebar dan mendapat perhatian masyarakat. Sementara itu, LSM dan elit yang bersimpati dapat memberikan legitimasi serta akses ke ruang-ruang politik dan kebijakan. Dengan adanya dukungan tersebut, gerakan masyarakat dapat bergerak lebih luas dan terorganisir. Pada akhirnya, dukungan dari kelompok sekutu ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan gerakan dalam mencapai tujuannya.

Kehadiran *allies* atau kelompok sekutu merupakan salah satu faktor penting dalam menjelaskan bagaimana gerakan #EndSARS di Nigeria dapat berkembang dari kampanye digital pada 2017 menjadi gerakan sosial berskala nasional dan internasional pada 2020. Sejak awal kemunculannya pada 2017, Gerakan #EndSARS tidak lahir sebagai gerakan yang terorganisir secara formal. Kampanye ini bermula dari pengalaman individual warga Nigeria, khususnya kaum muda, yang menjadi korban kekerasan, pemerasan, dan penahanan sewenang-wenang oleh unit SARS. Media sosial, terutama Twitter, menjadi ruang awal bagi korban dan saksi untuk membagikan pengalaman mereka. Dalam fase awal ini, media berperan sebagai sekutu utama yang memungkinkan isu kekerasan polisi menembus batas ruang privat dan menjadi persoalan publik. Tanpa dukungan media digital sebagai saluran komunikasi, narasi korban kemungkinan besar akan tetap terfragmentasi dan tidak terhubung satu sama lain (Akerele-Popoola, Azeez, and Adeniyi 2022, 5).

Peran media ini semakin menguat pada periode 2019–2020 ketika intensitas protes meningkat. Media digital tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memfasilitasi mobilisasi massa secara real-time. Informasi mengenai lokasi demonstrasi, kebutuhan logistik, serta peringatan keamanan disebarkan dengan cepat melalui *platform daring*. Hal ini menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai sekutu strategis yang menggantikan peran organisasi formal dalam koordinasi gerakan. Ini menegaskan bahwa keberhasilan mobilisasi #EndSARS tidak dapat dilepaskan dari kemampuan aktivis memanfaatkan media digital untuk menghubungkan ruang daring dan luring secara simultan (Etim et al. 2025, 1).

Selain media digital, media arus utama, baik nasional maupun internasional juga memainkan peran sebagai sekutu. Pada tahap awal, banyak media nasional Nigeria cenderung berhati-hati atau bahkan absen dalam meliput aksi protes #EndSARS karena tekanan politik dan risiko represi. Karena pada saat itu *National Broadcasting Commission* (NBC) sempat mendenda tiga stasiun televisi/media arus utama besar di Nigeria karena menayangkan video protes yang diambil dari media sosial. Namun, ketika gerakan ini mulai mendapatkan perhatian luas di media sosial dan melibatkan jutaan warga, media arus utama tidak lagi dapat mengabaikannya. Media nasional yang ikut serta memberitakan di antara lain adalah Pulse, The Caple, Arise News, dan Sahara Reporters. Sejak tagar #EndSARS ramai di media sosial, liputan dari media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan Reuters sudah ikut memberitakan terkait kekerasan yang dilakukan unit SARS, media internasional ini berkontribusi besar dalam membingkai #EndSARS sebagai isu hak asasi manusia, bukan hanya sekadar

gangguan keamanan domestik. Dengan demikian, media internasional berfungsi sebagai *external allies* yang membawa isu lokal Nigeria ke dalam arena perhatian global (Uwazuruike 2020).

Selain media, organisasi masyarakat sipil dan LSM merupakan sekutu penting dalam memperkuat struktur gerakan #EndSARS. Berbeda dengan media yang berperan pada ranah narasi dan mobilisasi, LSM memberikan dukungan dalam bentuk advokasi hukum, dokumentasi pelanggaran HAM, dan pengawasan kebijakan publik. Organisasi seperti Amnesty International ikut memberikan laporan terkait kekerasan yang dilakukan unit SARS. Lalu Human Rights Watch, juga menuliskan dalam laporannya bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh unit SARS dalam laporannya. Laporan-laporan ini menjadi sumber legitimasi penting bagi tuntutan demonstran, karena didasarkan pada metodologi investigasi yang diakui secara internasional. LSM lokal juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Organisasi masyarakat sipil Nigeria membantu menyediakan bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap, serta mendampingi korban kekerasan polisi dalam proses hukum, kehadiran LSM sebagai sekutu struktural memungkinkan gerakan sosial bertahan lebih lama dan tidak mudah dipatahkan oleh represi negara (Amnesty International 2020).

Salah satu contoh paling menonjol dari peran LSM dan kelompok masyarakat sipil lokal Nigeria adalah keterlibatan *Feminist Coalition*. Mereka merupakan kelompok yang terdiri dari aktivis perempuan muda dari latar belakang kelas menengah yang memanfaatkan media sosial dan teknologi digital seperti Bitcoin untuk melakukan penggalangan dana, penyediaan logistik, serta transparansi keuangan dan koordinasi aksi secara desentralisasi selama aksi protes

pada tahun 2020. Kehadiran *Feminist Coalition* ini menunjukkan bahwa *allies* tidak selalu berasal dari aktor mapan atau institusi lama, tetapi juga dapat muncul dari jaringan masyarakat sipil baru yang memanfaatkan teknologi digital. Dukungan material dan organisasi yang diberikan kelompok ini memperkuat daya tahan gerakan, sekaligus menunjukkan bagaimana solidaritas lintas isu dapat memperluas basis gerakan sosial (Omotoso and Faniyi 2024).

Selain media dan juga LSM, kelompok elit dan figur publik juga berperan sebagai sekutu dalam Gerakan #EndSARS. Keterlibatan selebritas, musisi, dan influencer Nigeria memberikan visibilitas tambahan terhadap gerakan, terutama di kalangan masyarakat yang sebelumnya apatis atau tidak terlibat langsung. Selebriti memegang peran penting dalam kesuksesan gerakan EndSARS di Nigeria dengan memanfaatkan *platform* media sosial mereka untuk mengangkat isu kekejaman polisi, khususnya oleh SARS. Para selebriti nasional seperti Davido, Wizkid, Burnaboy, dan DJ Switch serta selebriti internasional seperti Kanye West, Beyoncé, dan Anthony Joshua secara aktif mendukung gerakan ini melalui endorsement dan penyebaran pesan kepada penggemar mereka, sehingga memperluas jangkauan protes. Peran spesifik mereka termasuk memobilisasi massa muda untuk bergabung dalam aksi, meningkatkan perhatian publik, dan menekan pemerintah melalui sorotan global. Dukungan dari selebriti juga memperkuat agenda media sosial dengan mengangkat tagar #EndSARS menjadi trending topic internasional, yang akhirnya menarik simpati dan dukungan internasional. Selain itu, CEO Twitter bahkan menciptakan emoji khusus EndSARS sebagai bentuk solidaritas, menandakan pentingnya endorsement publik figur dalam penyebaran informasi. Dengan demikian, selebriti berperan

sebagai katalisator yang menghubungkan aktivisme digital dengan aksi nyata di lapangan, membantu memperkuat gerakan dan mendesak perubahan sosial. Peran mereka memperlihatkan bagaimana kekuatan pengaruh popularitas dapat digunakan untuk mendukung keadilan sosial dan mengadvokasi perubahan pemerintahan (Martins 2023, 7).

Secara keseluruhan, kehadiran media, LSM, dan kelompok elit sebagai *allies* merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dinamika dan keberhasilan Gerakan #EndSARS di Nigeria pada periode 2017–2020. Media memungkinkan pembentukan narasi tandingan dan mobilisasi massa, LSM memberikan legitimasi hukum dan advokasi kebijakan, sementara kelompok elit dan aktor internasional memperluas jangkauan serta tekanan politik terhadap negara.

Tabel 4. Perkembangan dukungan Terhadap Gerakan #EndSARS dari Tahun 2017-2020

Tahun	Pihak Pendukung (Allies)	Bentuk Dukungan & Peran Utama
2017	Media Digital (Twitter), Kaum Muda Nigeria	Awal kampanye digital Twitter menjadi ruang berbagi pengalaman korban dan memicu narasi publik. Hal ini didukung pula oleh kaum muda Nigeria.
2019	Media Digital (Twitter)	Media digital berperan untuk memfasilitasi mobilisasi massa secara real-time dan penyebaran informasi logistik maupun keamanan.
2020	Human Rights Watch (HRW)	LSM ini membantu mendukung gerakan dengan menulis laporan mengenai penyiksaan dan kekerasan terhadap tahanan oleh unit SARS, yang mana laporan ini membantu masyarakat dalam memahami isu dan menyebarluaskan informasi.

2020	Amnesty International	LSM ini membantu menyusun laporan investigasi terkait kekerasan unit SARS sebagai sumber legitimasi internasional.
	Media Internasional (BBC, Al Jazeera, Reuters)	Media internasional berperan dalam membingkai #EndSARS sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skala global.
	Feminist Coalition	LSM ini membantu dalam aspek penggalangan dana, penyediaan logistik, dan juga transparansi keuangan selama aksi protes.
	Selebriti Nasional (Davido, Wizkid, Burnaboy, DJ Switch)	Selebriti nasional membantu mobilisasi massa muda melalui media sosial dan partisipasi langsung di lapangan.
	Selebriti Internasional (Kanye West, Beyoncé, Anthony Joshua)	Selebriti internasional memberikan tekanan global dan memperluas jangkauan isu ke komunitas internasional.
	Sektor Teknologi (CEO Twitter/Jack Dorsey)	Menciptakan emoji khusus #EndSARS sebagai bentuk solidaritas digital global.
	LSM Lokal & Organisasi Sipil	LSM lokal membantu dalam advokasi hukum bagi demonstran yang ditangkap dan juga melakukan pendampingan korban kekerasan.

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2017 – 2020

3.4 State Capacity for Repression dalam Gerakan #EndSARS di Nigeria

Tingkat represi negara juga memiliki pengaruh besar terhadap apakah sebuah gerakan masyarakat dapat berkembang, berhasil, atau justru mengalami kegagalan. Tingkat represi yang dilakukan negara dapat memengaruhi proses mobilisasi dalam gerakan yang sedang berlangsung. Ketika represi dilakukan

secara tinggi, ruang gerak gerakan menjadi terbatas dan partisipasi masyarakat cenderung menurun karena adanya rasa takut atau tekanan. Kondisi ini membuat gerakan sulit berkembang dan mempertahankan momentumnya. Sebaliknya, ketiadaan atau rendahnya tingkat represi dari negara dapat memberikan ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk terlibat. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan risiko kegagalan dan memperbesar peluang tuntutan masyarakat untuk tercapai (McAdam, McCarthy, & Zald 1996)..

Negara memiliki peran sentral dalam menentukan arah gerakan sosial melalui berbagai instrumen represi yang menjadi bagian dari struktur peluang politik. Bentuk represi ini dapat berupa tindakan fisik langsung oleh aparat keamanan, seperti pembubaran massa atau penangkapan aktivis, yang bertujuan meningkatkan risiko partisipasi bagi individu. Selain kekerasan fisik, negara juga menerapkan represi administratif melalui kriminalisasi hukum dan pembatasan izin yang secara sistematis menghambat ruang gerak organisasi. Strategi lain yang lebih tertutup mencakup penggunaan intelijen untuk infiltrasi dan pengawasan ketat yang merusak kepercayaan internal di dalam kelompok penantang. Dampak dari tekanan ini tidak selalu memadamkan gerakan dalam beberapa kasus, tindakan brutal negara justru memicu kemarahan publik yang lebih luas yang memperkuat legitimasi gerakan. Namun, secara umum represi yang konsisten memaksa gerakan untuk melakukan adaptasi taktis, sering kali mengubah struktur organisasi dari terbuka menjadi lebih rahasia atau informal (McAdam, McCarthy, & Zald 1996).

Pada fase awal antara 2017 hingga 2019, negara melakukan represi menggunakan pengumuman reformasi dan pembubaran SARS. Dimana,

pemerintah berkali-kali mengumumkan reformasi atau pembubaran SARS, namun tanpa perubahan nyata di lapangan. Tindakan ini merupakan upaya sistematis untuk meredam kemarahan publik melalui konsesi simbolis yang sebenarnya bertujuan menghambat ruang gerak organisasi (Amnesty International 2020).

Memasuki tahun 2020, ketika video kekerasan polisi kembali viral dan memicu demonstrasi di jalanan, negara mulai menggeser strateginya dari konsesi simbolis menuju represi fisik langsung. Di berbagai kota seperti Abuja dan Lagos, kepolisian Nigeria menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang damai. Dengan menciptakan ancaman fisik, negara berusaha mengirimkan sinyal bahwa biaya untuk menuntut keadilan jauh lebih tinggi daripada manfaat yang mungkin didapat. Namun, pada tahap ini, represi fisik justru menjadi boomerang dimana alih-alih takut, massa justru semakin solid karena merasa hak-hak dasar mereka diinjak-injak oleh aparat yang seharusnya melindungi mereka (Amnesty International 2021).

Selain kekerasan fisik, pemerintah Nigeria juga melakukan pembekuan rekening bank milik para aktivis dan organisasi pendukung gerakan oleh Bank Sentral Nigeria (CBN). Dengan melabeli pendanaan protes sebagai "pendanaan terorisme", negara berusaha melumpuhkan logistik gerakan. Tanpa akses ke dana untuk makanan, bantuan medis, dan bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap, struktur organisasi gerakan dipaksa untuk berjuang dalam kondisi kekurangan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memukul dengan tongkat di jalanan, tetapi juga mencekik gerakan melalui jalur birokrasi yang dingin (Okanga 2022).

Strategi lain yang lebih tertutup dan berbahaya adalah penggunaan intelijen untuk infiltrasi dan sabotase. Selama protes berlangsung, muncul laporan konsisten mengenai keberadaan "preman" atau aktor non-negara yang disusupkan ke dalam kerumunan demonstran #EndSARS. Para penyusup ini melakukan tindakan vandalisme dan kekerasan untuk merusak citra damai gerakan tersebut. Penggunaan intelijen dan provokator bertujuan merusak kepercayaan internal di dalam kelompok penantang. Ketika kekacauan terjadi, negara memiliki alasan atau pembenaran moral untuk melakukan tindakan keras yang lebih brutal dengan dalih "menjaga ketertiban umum" padahal kekacauan tersebut merupakan hasil dari infiltrasi yang disengaja (Iwuoha and Aniche 2021).

Puncak dari konfrontasi ini terjadi pada malam tragis 20 Oktober 2020 di Lekki Toll Gate, Lagos. Dalam sebuah tindakan represi fisik yang paling ekstrem, tentara Nigeria melepaskan tembakan ke arah demonstran yang sedang duduk dengan damai sambil mengibarkan bendera nasional. Peristiwa ini mencerminkan penggunaan instrumen kekerasan untuk menutup struktur peluang politik. Secara teoritis, tindakan brutal ini dimaksudkan sebagai titik akhir bagi gerakan. Negara berasumsi bahwa dengan menghilangkan nyawa dan menunjukkan kekejaman tanpa batas, massa akan bubar secara permanen karena rasa takut yang eksistensial (Amnesty International 2020).

Namun, dampak dari tekanan ini tidak selalu memadamkan gerakan secara instan. Pembantaian di Lekki justru memicu efek bumerang. Rekaman langsung (live streaming) dari lokasi kejadian menyebarkan kemarahan ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Tindakan negara yang brutal justru memperkuat legitimasi gerakan di mata komunitas internasional dan memicu kecaman luas dari PBB

hingga tokoh-tokoh global. Dalam konteks ini, represi negara yang berlebihan justru membuktikan kebenaran tuntutan para demonstran mengenai kebrutalan aparat, yang secara paradoks memberikan energi moral baru bagi narasi gerakan tersebut.

Sebagai kesimpulan, kasus #EndSARS di Nigeria memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana negara menggunakan spektrum represi yang luas. Meskipun negara berhasil membersihkan jalanan dari demonstran, represi tersebut gagal mencabut akar ketidakpuasan sosial. Represi memperkuat solidaritas, tetapi juga membatasi ruang aksi fisik gerakan.

Tabel 5. Bentuk Represi yang Dilakukan Negara terhadap Gerakan #EndSARS Tahun 2017 - 2020

Tahun	Bentuk Represi
2017 - 2019	Negara melakukan represi berupa pengumuman reformasi yang berulang-ulang tanpa melakukan perubahan nyata di lapangan. Upaya ini merupakan upaya sistematis untuk meredam kemarahan publik dan menghambat ruang gerak organisasi.
2020	Pada tahun 2020, negara melakukan berbagai bentuk represi terhadap gerakan #EndSARS. Diantaranya adalahh penggunaan gas air mata, meriam air, hingga penembakan mematikan oleh tentara di Lekki Toll Gate, melakukan membekukan rekening bank aktivis gerakan serta melabeli mereka sebagai pendukung terorisme guna melumpuhkan logistic, lalu penggunaan provokator guna memicu vandalisme demi merusak citra damai

	gerakan ini. Meskipun spektrum represi ini berhasil membersihkan jalanan, namun tindakan tersebut justru memicu efek bumerang yang malah memperkuat legitimasi gerakan di mata internasional.
--	---

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2017 - 2020

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan #EndSARS di Nigeria muncul sebagai respons atas akumulasi praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh unit Special Anti-Robbery Squad (SARS), yang memicu ketidakpuasan masyarakat sipil dan mendorong mobilisasi kolektif. Berawal dari kampanye media sosial pada 2017, gerakan ini berkembang menjadi gerakan nasional pada 2020 yang tidak hanya menuntut pembubaran SARS, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Penelitian ini berfokus pada perkembangan gerakan dalam periode 2017–2020 dengan mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, #EndSARS dipahami sebagai respons terhadap struktur peluang dalam sistem politik Nigeria.

Penelitian ini menggunakan kerangka Political Opportunity Structures (POS) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu keterbukaan institusi politik, perpecahan elit, kehadiran sekutu, dan kapasitas represi negara. Kerangka ini menekankan bahwa perkembangan gerakan sosial dipengaruhi tidak hanya oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang membentuk peluang mobilisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan media daring. Data dianalisis secara sistematis berdasarkan dimensi POS untuk menjelaskan hubungan antara struktur peluang politik dan dinamika gerakan #EndSARS.

Praktik kekerasan oleh SARS berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan, mencakup penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga eksekusi di luar hukum. Kondisi ini memicu akumulasi ketidakpuasan, terutama di kalangan generasi muda yang paling rentan terhadap tindakan represif.

Kemunculan tagar #EndSARS pada 2017 menjadi bentuk artikulasi kolektif yang awalnya berkembang sebagai kampanye digital. Seiring waktu, gerakan ini bertransformasi menjadi mobilisasi sosial yang lebih luas, dengan puncak eskalasi pada 2020 akibat meningkatnya kekerasan dan kegagalan respons pemerintah.

Perkembangan #EndSARS menunjukkan interaksi dinamis antara masyarakat sipil dan negara. Masyarakat sipil meningkatkan kapasitas mobilisasi melalui solidaritas lintas kelompok dan pemanfaatan media sosial sebagai alat tekanan politik. Sebaliknya, respons pemerintah cenderung reaktif dan inkonsisten, mulai dari janji reformasi hingga tindakan represif. Puncaknya terjadi pada protes Oktober 2020 yang berujung pada pembubaran SARS, namun juga memperdalam ketidakpercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan kondisi politik yang lebih luas.

Keterbukaan institusi politik di Nigeria pada periode ini keterbukaan namun terbatas, institusi politik memang tidak melarang adanya gerakan namun hanya saja terbatas karena tingginya tingkat represif pada kelompok protes di jalan. Meskipun terdapat janji reformasi, langkah tersebut cenderung bersifat administratif tanpa perubahan struktural yang nyata. Akibatnya, masyarakat mengalihkan mobilisasi ke ruang digital melalui kampanye #EndSARS. Ketimpangan antara retorika dan praktik represif, terutama dalam peristiwa Lekki 2020, memperkuat ketidakpercayaan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ruang politik mendorong penggunaan strategi non-institusional dalam gerakan sosial.

Perpecahan di antara elit politik Nigeria turut membuka peluang bagi perkembangan gerakan #EndSARS. Ketidaksinkronan respons antar elit menunjukkan lemahnya koordinasi dan absennya kebijakan yang konsisten. Sejak 2017 hingga 2020, respons negara yang lamban, simbolik, dan represif memperdalam ketidakpercayaan publik. Perbedaan kepentingan antara elit reformis dan status quo membuat kebijakan menjadi tidak efektif. Kondisi ini menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh aktivis dan meningkatkan tekanan terhadap negara.

Kehadiran sekutu seperti media, LSM, dan figur publik berperan penting dalam memperkuat gerakan #EndSARS. Media berfungsi sebagai sarana mobilisasi dan penyebaran informasi yang menghubungkan ruang digital dan fisik. LSM memberikan legitimasi melalui advokasi hukum dan dokumentasi pelanggaran HAM. Sementara itu, dukungan elit dan aktor internasional meningkatkan visibilitas serta tekanan politik terhadap pemerintah. Sinergi ini memungkinkan gerakan berkembang menjadi lebih terorganisir dan berdampak luas.

Tingkat represi negara menjadi faktor krusial dalam membentuk dinamika gerakan #EndSARS. Negara menggunakan berbagai bentuk represi, mulai dari administratif hingga kekerasan fisik, untuk membatasi mobilisasi. Namun, pada 2020, represi yang meningkat justru memicu solidaritas yang lebih luas di masyarakat. Tindakan seperti pembekuan rekening dan kekerasan di Lekki menunjukkan upaya sistematis menekan gerakan. Secara paradoks, represi tersebut menghasilkan efek balik yang secara paradoks memperkuat legitimasi, meskipun secara bersamaan membatasi ruang aksi gerakan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, studi selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan analisis yang lebih integratif dengan mengkombinasikan kerangka *Political Opportunity Structures* (POS) dengan perspektif teoritis lain dalam studi gerakan sosial, seperti *resource mobilization* dan *framing processes*. Integrasi ini penting untuk menangkap dinamika gerakan secara lebih holistik, mengingat POS cenderung menekankan faktor struktural eksternal, sementara dimensi internal seperti strategi mobilisasi sumber daya dan konstruksi makna kolektif juga memiliki peran signifikan.

Selain itu penulis juga merekomendasikan memperluas cakupan analisis dengan membandingkan gerakan #EndSARS dengan gerakan sosial lain di negara berkembang yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan komparatif ini akan membantu mengidentifikasi pola umum maupun perbedaan kontekstual dalam hubungan antara struktur peluang politik dan keberhasilan gerakan sosial. Dengan perluasan fokus tersebut, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan studi gerakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abiodun, Dr. Temitope F., Adedokun O. Oloyede, Owoyemi E. Ademola, Ogechi Abah, and Opeyemi S. Kehinde. 2020. "Unlawful Killings of Civilians by Officers of the Special Anti- Robbery Squad (Sars) Unit Of The Nigerian Police In Southwest Nigeria: Implications For National Security." *African Journal of Law, Political Research and Administration* 3, no. 1 (Januari): 49-64. <https://www.researchgate.net/publication/342038754>.
- Agbai, Edward P., and Shina J. Adesanya. 2023. "The Endsars Protest Movement as A Catalyst for Realigning Nigeria's Sustainable Development Goals with National Development Objectives." *Journal of Public Administration and Social Welfare Research (JPASWR)* 8, no. 2 (Februari): 43-56. [10.56201/jpaswr.v8.no2.2023.pg43.56](https://www.researchgate.net/publication/342038754).
- Agustina, Dwi A., and Sonny Sudia. 2025. "Peran Gerakan Sosial #Endsars Dalam Pembubaran Sars Di Nigeria Tahun 2017-2020." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 13 (3): 637-653. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2025/10/eJournal%20Dwi%20Angelian%20Agustina%20\(10-21-25-10-43-41\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2025/10/eJournal%20Dwi%20Angelian%20Agustina%20(10-21-25-10-43-41).pdf).
- Akerele-Popoola,, Oluwakemi E., Adesina L. Azeez, and Abiodun Adeniyi. 2022. "Twitter, Civil Activisms and EndSARS Protest in Nigeria as a Developing Democracy." *Cogent Social Sciences* 8 (1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2095744>.
- Asogwa, Kenneth C., Herbert C. Edeh, Anthony C. Ajah, Paul H. Omeh, Mathias I. Asadu, Damian C. Ogbuabor, and Elias C. Ngwu. 2021. "The state, End SARS protests and human rights violation in Nigeria." *journal of african studies* 22 (2): 58-81. <https://doi.org/10.53836/ijia/2021/22/2/004>.
- Bello, Bello S., Muhammad A. Alhassan, and Isa Inuwa-Dutse. 2023. "#EndSARS Protest: Discourse and Mobilisation on Twitter." <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.06176>.
- Dami, Caleb D. 2021. "The #EndSARS Protests, Corruption and Insecurity Debates in Nigeria." *journal of african studies* 22 (2): 163 - 178. <https://doi.org/10.53836/ijia/2021/22/2/009>.
- Ecoma, Bonnievololo E. 2023. "A post-mortem assessment of the #EndSARS protest and police brutality in Nigeria." *African Human Rights Law Journal* 23:156 - 181. <https://orcid.org/0000-0001-8213-0316>.
- Ekpeowoh, Samuel O., Emmanuel E. Okon, and Madeleine Mac-Chile. 2024. "Human Rights Violations and Accountability: A Case Study of the EndSARS Movement." *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* 5 (10): 1-11. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.10.1>.

- Etim, Emma, Jacob O. Fatile, Joseph E. Duke, Busayo Q. Ibikunle, and Emmanuel J.C. Duru. 2025. "Digital activism and collective resistance to police brutality: Systematic review of the quieter and less visible narratives of #EndSARS protest." *Social Sciences & Humanities Open* 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101722>.
- Fofah, Florence O. 2025. "The Influence of the Political Elite on State Policy and Governance: the Nigerian Experience." *Wukari International Studies Journal* 9 (8): 9.
- Idowu, Samuel S., and Ekene C. Chukwudi. 2021. "Police brutality and civil violence implications on societal peace and the economy: a study of end-Sars protests in Nigeria Creators." *Political Science and Security Studies Journal* 2 (3): 3-15. 10.5281/zenodo.5534837.
- Iwuoha, Victor C., and Ernest T. Aniche. 2021. "Protests and blood on the streets: repressive state, police brutality and #EndSARS protest in Nigeria." *Security Journal* 35:1102 - 1124. <https://doi.org/10.1057/s41284-021-00316-z>.
- Makinde, Ebenezer. 2024. "International Political Contexts, Digital Technologies, and Political Outcomes in Nigeria's #EndSARS Movement." *Protest* 4 (1): 5 - 29. <https://doi.org/10.1163/2667372X-bja10059>.
- Martins, Nwokeocha I. 2023. "Evaluating the Role of Celebrity Endorsements in the Success of ENDSARS Protests in Nigeria." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 2, no. 1 (Maret): 1-12. <https://doi.org/10.57235/jetish.v2i1.203>.
- Ojedokun, Usman A., Yetunde O. Ogunleye, and Adeyinka A. Aderinto. 2021. "Mass mobilization for police accountability: The case of Nigeria's #EndSARS protest." *A Journal of Policy and Practice* 15, no. 3 (Januari): 1894–1903. <https://doi.org/10.1093/police/paab001>.
- Okanga, Okanga O. 2022. "A law and politics contextualization of corporate activism in Nigeria's 2020 anti-police brutality campaign." *SN Social Sciences* 2 (30). <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00326-7>.
- Okereke, Melody, Isaac O. Ogunkola, Yusuff A. Adebisi, and Don E. Lucero-Prisno III. 2021. "Dealing with two 'SARS' outbreaks in Nigeria: The public health implications." *Journal of the Egyptian Public Health Association* 96 (27). <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100054>.
- Omeni, Akali. 2022. "Framing Injustice: Special Anti-Robbery Squads (SARS) in Nigeria and the #Endsars Protest Response from a Social Movement Theory Perspective." *Modern Africa: Politics, History and Society* 10 (2): 15. <https://doi.org/10.26806/modafr.v10i2.409>.
- Omotoso, Sharon A., and Ololade Faniyi. 2024. "The End SARS Women's Coalition: Exploring the Persistence of Women's Movements through Feminist Generations." *Feminist Africa* 5 (1): 125-151. <https://www.jstor.org/stable/48778690>.

- Solomon, Temitope O. 2025. "The Nigerian Political System: Youth Political Participation and The End SARS Protests." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 6, no. 9 (July): 5471 - 5483. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000417>.
- Udenze, Silas, Antoni R. Telo, and Fernanda Pires. 2024. "'The EndSARS movement is an umbrella for other challenges': Assessing Nigeria's EndSARS protest through the theoretical lens of intersectionality." *Media, War and Conflict*, (March), 1-18. DOI: 10.1177/17506352241239550.
- Ugwueze, Michael I. 2024. "'The 2020 #EndSARS Protests in Nigeria: Understanding How Perception Influences Government Approach to Civil Uprising in a Dictatorial State.'" *Protest* 4 (2): 177-206. <https://doi.org/10.1163/2667372X-04020001>.
- Uwazuruike, Allwell. 2021. "#EndSARS: A Human Rights Evaluation of the Successes and Failures One Year Later." *Georgetown Journal of International Affairs*. <https://gia.georgetown.edu/2021/12/13/endsars-a-evaluation-of-successes-and-failures-one-year-later/>.
- Uwazuruike, Allwell R. 2020. "#EndSARS: The Movement Against Police Brutality in Nigeria." *Harvard Human Rights Journal*. <https://harvardhrj.com/2020/11/endsars-the-movement-against-police-brutality-in-nigeria/>.

Buku

- Adebanwi, Wale, and Ebenezer Obadare, eds. 2013. *Democracy and Prebendalism in Nigeria: Critical Interpretations*. N.p.: Palgrave Macmillan.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. N.p.: OUP Oxford.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, eds. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. N.p.: Cambridge University Press.
- Open Society Institute. 2010. *Criminal Force: Torture, Abuse, and Extrajudicial Killings by the Nigerian Police Force*. N.p.: Open Society Institute.

Laporan

- Amnesty International. 2014. "'Welcome to hell fire': Torture and other ill-treatment in Nigeria." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/011/2014/en/>.
- Amnesty International. 2016. "'You have signed your death warrant' : Torture and other ill treatment in the Special Anti-Robbery Squad." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/4868/2016/en/>.

- Amnesty International Nigeria. 2020. "Nigeria: Time to end impunity: Torture and other human rights violations by special anti-robbery squad (SARS)." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/9505/2020/en/>.
- Basch, Sharon. 2024. "ECOWAS: Nigerian Govt Violated Human Rights in 2020 Protests." International Law in Brief. <https://www.asil.org/ILIB/ecowas-nigerian-govt-violated-human-rights-2020-protests>.
- NigeriaRights.gov.ng. 2018. "Report of the Presidential Panel on the Reform of the Police Special Anti-Robbery Squad." National Human Rights Commission (NHRC) Report. <https://www.nigeriarights.gov.ng/files/publications/VOL%20I-%20EXECUTIVE%20SUMMARY%20OF%20REPORT%20OF%20THE%20PRESIDENTIAL%20PANEL%20ON%20SARS%20REFORM.pdf>.

Artikel Daring

- Akinwotu, Emmanuel. 2020. "Nigeria cracks down on 'end Sars' protesters, alleging terrorism." *The Guardian*, November 13, 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/13/nigeria-cracks-down-on-end-sars-protesters-alleging-terrorism>.
- Al Jazeera. 2020. "#EndSARS: Nigeria says Special Anti-Robbery Squad dissolved." *Police*, October 11, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/11/endsars-nigeria-dissolves-special-anti-robbery-squad>.
- Al Jazeera. 2020. "Nigeria's SARS: A brief history of the Special Anti-Robbery Squad." *Al Jazeera*, October 22, 2020. <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/22/sars-a-brief-history-of-a-rogue-unit>.
- Amnesty International. 2020. "Nigeria: Horrific reign of impunity by SARS makes mockery of anti-torture law." Amnesty.org. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/nigeria-horrific-reign-of-impunity-by-sars-makes-mockery-of-anti-torture-law/>.
- Amnesty International. 2020. "Nigeria: Killing of #EndSARS protesters by the military must be investigated." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/killing-of-endsars-protesters-by-the-military-must-be-investigated/>.
- Amnesty International. 2021. "#EndSARS movement: from Twitter to Nigerian Streets." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2021/02/nigeria-end-impunity-for-police-violence-by-sars-endsars/>.
- BBC News. 2020. "Nigerian SWAT team: Inspector General of Police set up SWAT to replace SARS - How #EndSARS Nigeria protests change things." BBC. <https://www.bbc.com/pidgin/tori-54536327>.

- BBC News Indonesia. 2020. "Kebrutalan polisi' di Nigeria: Kemarahan rakyat atas penembakan demonstran berkembang menjadi kerusuhan, 2020." Dunia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54655592>.
- detikNews. 2020. "Nigeria Diguncang Kerusuhan Berkepanjangan Akibat Kebrutalan Polisi." *detikNews*, 2020. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5225827/nigeria-diguncang-kerusuhan-berkepanjangan-akibat-kebrutalan-polisi>.
- Egbejule, Eromo. 2021. "Panel of inquiry finds Nigerian army culpable in Lekki 'massacre.'" *Al Jazeera*, November 16, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/16/panel-of-inquiry-finds-nigerian-army-culpable-in-lekki-massacre>.
- Ekpu, Ray. 2020. "EndSARS: The big picture." *The Guardian*, October 20, 2020. <https://guardian.ng/opinion/endsars-the-big-picture/>.
- Human Right Watch. 2019. "Nigeria Events of 2018." Human Right Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/nigeria>.
- Human Rights Watch. 2021. "Nigeria: A Year On, No Justice for #EndSARS Crackdown." *Human Rights Watch*, October 19, 2021. <https://www.hrw.org/news/2021/10/19/nigeria-year-no-justice-endsars-crackdown>.
- Human Right Watch. 2020. "Nigeria: End Excessive Force Against Protesters." Human Right Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/10/22/nigeria-end-excessive-force-against-protesters>.
- Malumfashi, Sada. 2020. "Nigeria's SARS: A brief history of the Special Anti-Robbery Squad." *Al Jazeera*, October 22, 2020. <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/22/sars-a-brief-history-of-a-rogue-unit>.
- Olufemi, Alfred. 2018. "#EndSARS: Osinbajo orders immediate review of SARS operations." *Premium Times*, August 14, 2018. <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/280111-endsars-osinbajo-orders-immediate-review-of-sars-operations.html>.
- National African Student Association. 2020. "History of Nigeria's Special Anti-Robbery Squad." National African Student Association Online. <https://nationalafsa.org/history-of-nigerias-special-anti-robbery-squad/>.
- Omokanye, Adetona. 2020. "What is the #EndSARS movement?" Amnesty International. <https://www.amnesty.org.au/what-is-the-endsars-movement/>.
- Orjinmo, Nduka. 2020. "End Sars protests: The young Nigerians who forced the president to back down." *BBC*, October 12, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-africa-54508781>.
- Presidential Villa State House. 2019. "President Muhammadu Buhari Receives Report of SARS Reform." statehouse.gov.ng.

<https://statehouse.gov.ng/president-muhammadu-buhari-receives-report-of-sars-reform/>.

- R. Chow, Andrew. 2020. "The Nigerian Government Has Pledged to #EndSARS and Reform the Police. This Isn't the First Time They've Made That Promise." *TIME Magazine*, October 28, 2020. <https://time.com/5904345/endsars-history-nigeria/>.
- ReliefWeb. 2021. "Lessons from the #EndSars movement in Nigeria." ReliefWeb/ACLED Report. <https://reliefweb.int/report/nigeria/lessons-endsars-movement-nigeria>.
- TheCable. 2020. "FULL LIST: The demands of #EndSARS protesters." *Top Stories*, October 13, 2020. <https://www.thecable.ng/full-list-the-demands-of-endsars-protesters/>.
- Vanguard. 2017. "Rivers APC, PDP disagree over #EndSARS campaign." *News*, December 11, 2017.